

Hari,Tanggal : Kamis, 15 Mei 2015
Waktu : 11.00-11.55 Wita
Tempat : Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas
Sastra Universitas Hasanuddin.

**PEMERINTAHAN AHMAD DARA SJAHRUDDIN
SEBAGAI WALIKOTA MAKASSAR
1952-1957**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra
Pada Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra
Universitas Hasanuddin

DISUSUN OLEH :

FITRI FEBRIATI SAFITRI

F811 10 101

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2015



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PEMERINTAHAN AHMAD DARA SJAHRUDDIN SEBAGAI WALIKOTA
MAKASSAR 1952-1956**

Disusun dan diajukan oleh :

FITRI FEBRIATI SAFITRI

F811 10 101

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 15 Mei 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Konsultan I

Konsultan II

Dr. Bambang Sulistyoyo Edi P., M.S
NIP. 19550315 198503 1 004


Drs. Dias Pradadimara, M.A
NIP . 19641217 199803 1 001

Dekan Fakultas Sastra
Universitas Hasanuddin

Ketua Jurusan Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin



Prof. Drs. Burhanuddin Arafah, M.Hum.Ph.D
NIP. 19650303 199002 1 001



Dr. Bambang Sulistyoyo Edi P., M.S
NIP. 19550315 198503 1 004



LEMBAR PERSETUJUAN
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

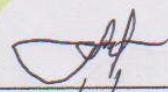
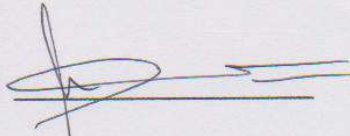
Pada hari Jumat 15 Mei 2015 panitia ujian skripsi menerima dengan baik skripsi yang berjudul :

**“PEMERINTAHAN AHMAD DARA SJAHRUDDIN SEBAGAI WALIKOTA
MAKASSAR 1952-1956”**

Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana, pada Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Makassar 15 Mei 2015



- | | | | |
|---|--------------|---|---|
| 1. Dr Bambang Sulistyoyo Edi, P, M.S | Ketua | : |  |
| 2. H.M., Bahar Akkase Teng L.Cp., M.Hum | Sekretaris | : |  |
| 3. Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum | Penguji I | : |  |
| 4. Margriet Moka Lappia, S.S., M.S | Penguji II | : |  |
| 5. Dr Bambang Sulistyoyo Edi, P, M.S | Konsultan I | : |  |
| 6. Drs. Dias Pradadimara, M.A | Konsultan II | : |  |



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada tauladanku Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya serta sahabat-sahabat beliau. Disamping sebagai suatu karya penelitian, dan juga sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana, terselesaikannya skripsi ini tak lain merupakan suatu simbol pencapaian dari harapan-harapan sejumlah pihak terhadap penulis selama menyangang status mahasiswa serta ridha Allah SWT sebagai sang pemilik segala kehendak. Oleh karena itu, sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengambil bagian dalam terselesaikannya skripsi ini serta ucapan syukur yang tiada henti kepada Allah SWT. Melalui pengantar ini, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua penulis, Ibunda **HJ. Sittiara Selle** beserta Ayahanda **H. Muslimin Malii** atas doa dan harapan yang selalu mengalir tiada henti disetiap hembusan nafas penulis, juga kepada Kanda **Fitra Lukyta Minra** dan Adinda **Fauzan Zarah Zafirin, Muh. Farel Muslimin** atas kasih sayang, pembelajaran hidup dan suka-duka yang kita lewati bersama.
2. Ibu Rektor Universitas Hasanuddin Ibu Dwi Aries Putbuluhu
3. Ketua Jurusan Ilmu Sejarah **Dr. Bambang Sulistyو Edi, M.S** sebagai



osen sekaligus orang tua penulis selama menempuh pembelajaran di
ngku perkuliahan.

4. Kedua Dosen Pembimbing **Dr. Bambang Sulistyو Edi, M.S** dan **Drs. Dias Pradadimara, M.A.**, terimakasih yang tiada bisa penulis balas dengan apapun atas ilmu, arahan dan masukan, juga bantuann serta kerjasamanya selama penulisan skripsi ini. Banyak hal baru yang penulis dapatkan selama berada dibawah bimbingan beliau berdua.
5. Pembimbing proposal penulis **Drs. Dias Pradadimara, M.A.** terimakasih tiada tara atas segala metode pembelajaran yang beliau berikan kepada penulis dengan segala keterbatasan yang dimiliki penulis dan pembimbing akademik penulis **Dr. Andi Suriadi Mappangara** terimakasih atas bimbingannya selama ini serta seluruh dosen serta staf **Uddji Usman, S.SOS** Jurusan Ilmu sejarah, terimakasih.
6. Keluarga besarku **The Malta**, dan **The Ansell** serta kanda-kanda Hj. Resky Amalia Rahman S.Si.Apt., Adli Ikram Arief S.H. Adinda Resky Wulandari jangan terlalu banyak kegiatan malamnya, dan Zalzah Fariza semoga kalian cepat Sarjana amiin.
7. Sahabat-sahabatku **Malari 2010** Soraya Ibrahim, Nigrum Pagestu, Nurjannah Jamal, Puspita Sari, Dahliana S, Irmawati Cora, Nurlinda Inka, Satriawati, Rezky, Sri Wahyuni, Aidil Fadli, Septianus Yusuf, Ahmad Bardi, Khaerul Amri, Marwansyah, Apandi, Rapa, Rizal, Rezky Pamantung, Setiap pergantian waktu yang kita lewati bersama akhirnya termanifestasikan dalam terselesaikannya kripsi ini. Terimakasih atas unda, tawa, emosi dan kegilaan selama ini.



8. Sahabat-sahabat **HUMANIS KMFS-UH. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013.** Terimakasih atas canda,tawa dan emosi serta rasa kekeluargaan selama ini yang kalian berikan dan Terimakasih kanda Anna Asriani dan A. Lili Evita atas bantuannya dalam awal Penulisan Skripsi ini.
9. Teman-teman **KKN Gelombang 86, Kecamatan Biringkaya Makassar:** Putri Atika, Shinta Boli, Anna, Tika, Hardiansyah, Rauf, Michel, Pak Mur, Ardi terimakasih atas segala kekompakan dan pengalaman yang berharga.
10. Terimakasih Indofood menemani mulai semester 1 hingga selesainya Penulisan Skripsi ini. Terimakasih Yesung Oppa, Agang, Yesung Senior.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR NAMA WALIKOTA MAKASSAR.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang	1
1.2 Batasan Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Tinjauan Pustaka	8
1.7 Sistematika Pembahasan	11



BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Kaum Perantau Minangkabau di Makassar	13
2.2 Partai MASYUMI.....	16
2.3 Ahmad Dara Sjahruddin	18
A. Biografi Singkat.....	18
B. Harapan Ahmad Dara Sjahruddin.....	23

BAB III PEMILIHAN DEWAN KOTA DAN PEMILIHAN WALIKOTA

3.1 Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia	25
3.2 Proses Pemilihan Dewan KotaMakassar 1952	27
3.3 Proses Pemilihan Walikota Makassar 1952.....	35

BAB IV KEBIJAKAN DAN TANTANGAN AHMAD DARA SJAHRUDDIN PADA MASA PEMERINTAH 1952-1957

4.1 Kebijakan dan Masalah yang dihadapi Ahmad Dara Sjahruddin	44
A. Masalah Keuangan	44
B. Masalah Perumahan	45
C. Masalah Pendidikan	49
D. Masalah Uang Lembur	52
4.2 Terpilihnya Ahmad Dara Sjahruddin Anggota Parlemen	58

BAB V KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN.....



DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Distrik dan Yang Ikut Dalam Pemilihan	30
2.	Nama-nama Partai dan Jumlah Calon	31
3.	Hasil Pemilihan Dewan Kota	32
4.	Nama-nama Anggota Parlemen dan Partai Yang Terpilih	33
5.	Perolehan Suara Calon Walikota	40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran I	66
Lampiran II	69
Lampiran III	77
Lampiran IV	79
Lampiran V	80
Lampiran VI	81
Lampiran VI I	82
Lampiran V III	83
Lampiran IX	84
Lampiran X	87
Lampiran XI	91



DAFTAR SINGKATAN

APRIS	: Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	: Dewan Pemerintah Daerah
KNIL	: Koninklijk Nederlands Indisch Lager
TNI	: Tentara Negara Indonesia
PPPPS	: Pemimpin Pusat Persatuan Pegawai Propinsi Sulawesi
MASYUMI	: Majelis Syuro Muslim Indonesia
PARINDRA	: Partai Indonesia Raya
PSII	: Partai Serikat Islam Indonesia
PIR	: Partai Indonesia Raya
RI	: Republik Indonesia
UMI	: Universitas Muslim Indonesia
UNHAS	: Universitas Hasanuddin
RIS	: Republik Indonesia Serikat
NIT	: Negara Indonesia Timur
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
MULO	: Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
AMS	: Algemene Middelbare School
HIS	: Hollands Inlandse School
PARKINDO	: Partai Kristen Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
	: Partai Kedaulatan Rakyat
	: Pemuda Republik Indonesia
	: Dewan Perwakilan Wilayah



Daftar Nama-Nama Walikota Makassar

Hindia Belanda

- J.E. Dambrink (1918-1927)
- J.H. De Groot (1927-1931)
- G.H.J. Beikenkamp (1931-1932)
- F.C. Van Lier (1932-1933)
- Ch.H. Terlaag (1933-1934)
- L. Lewis (1934-1936)
- H.F. Brune (1936-1942)

Jepang

- Yamasaki (1942-1945)

NICA

- H.F. Brune (1945)
- D.M. Van Zwiellen (1945-1946)

Negara Indonesia Timur (NIT)

- Abd. Hamid Dg. Magassing (1947-1950)

Republik Indonesia Timur (RIS)

- J.M. Qaimuddin (1950-1951)
- J. Mawengkang (1951)

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)



- . Lili (1951)
- . Sjahrudin (1952-1957)

- H. M. Yusuf Dg. Mile (1956-1958)
- Abd. Latif Masikki (1958-1960)
- H. Areoppala (1960-1965)
- Kol. H. M. Dg. Patompo (1965-1978)
- Kol. Abustam (1978-1983)
- Kol. Jancy Raib (1983-1988)
- Kol. Surwahyo (1988-1993)
- H. A. Malik B. Masry, SE, Msi (1994-1999)
- Drs. H.B. Amiruddin Maula, SH, Msi (1999-2004)
- Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM. (2004-2008)
- Ir. H. Andi Herry Iskandar, Msi,
- Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM. (2008-2013)
- Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto (2013-2017)



ABSTRAK

Fitri Febriati Safitri, Nomor Pokok F81110101, dengan Judul “Pemerintahan Ahmad Dara Sjahruddin Sebagai Walikota Makassar 1952-1956”, di bawah bimbingan Bambang Sulistyو Edi dan Dias Pradadimara.

Penelitian ini membahas tentang pemerintahan di Kota Makassar tahun 1950an. Sebagai seorang pendatang dari Sumatera Barat ke Kota Makassar, Ahmad Dara Sjahruddin dapat dipercaya sebagai Walikota Makassar oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah, dan melalui pencarian sumber-sumber yang dilakukan di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Pemerintahan di Kota Makassar tahun 1950an, mengalami transisi pemerintahan dari masa NIT ke RIS dan ke masa NKRI. Ahmad Dara Sjahruddin memulai karirnya Politik di Kota Makassar tahun 1948 sebagai pengurus MASYUMI cabang Sulawesi dari situlah Ahmad Dara Sjahruddin dipilih melalui proses pemilihan anggota Dewan Kota tahun 1952 dan kemudian dicalonkan sebagai Walikota Makassar. Ahmad Dara Sjahruddin adalah Walikota definitif pertama setelah NKRI.

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Selama Ahmad Dara Sjahruddin menjabat sebagai Walikota Makassar beliau mengalami banyak masalah mulai dari permasalahan keuangan Kota Makassar, masalah pendidikan, masalah perumahan dan masalah uang lembur serta mendapat mosi tidak percaya oleh para anggota Dewan Kota akibat kesalahan dalam pembayaran uang lembur. Di tahun 1955 pada Pemilihan Umum pertama dia dipilih sebagai anggota perlemen. Terlepas dari semua permasalahan yang dihadapinya, Ahmad Dara Sjahruddin mampu memimpin Kota Makassar hingga 1956.

Kata kunci : Sejarah kota, sejarah lokal, Sulawesi Selatan



ABSTRACT

Fitri Febriati Safitri, Registration Number F8 11 10 101, with the title “ Government Ahmad Dara Sjahrudin As Mayor Of Makassar 1952-1956, under the guidance of Bambang Sulistyو Edi P, and Dias Pradadimara.

This study discusses the government in the city of Makassar 1950s. As a newcomer from Sumatera Barat to the city of Makassar, Ahmad Dara Sjahrudin trust worthy as the mayor of Makassar by the minister of interior. In this study the author uses the method of historical research, the search for the sources of the Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Government in the city of Makassar 1950s. has just undergone a transition government from time to time NIT-RIS and NKRI. Ahmad Dara Sjahrudin began his as an political career MASYUMI. Ahmad Dara Sjahrudin elected through the process of selecting board members in 1952 and then nominated as mayor of Makassar. Ahmad Dara Sjahrudin is the first defenitif mayor after the NKRI.

The results showed that Ahmad Dara Sjahrudin, as mayor of Makassar, he experienced many problems in the city of Makassar, ranging financial problem, educational problem of housing and overtime issues and receive a vote of no do not belive by the members of the city council due to error in the payment of overtime pay. In the 1955 the first general election he was elected as an mp. Regardless of all the problems it faces Ahmad Dara Sjahrudin capable of leading the city of Makassar to 1956.

Keywords : City History, local History, and Sulawesi Selatan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal dengan negara yang mempunyai ragam etnis, antara lain Ambon, Bugis, Jawa, Minangkabau, Minahasa, Tionghoa, dan lain-lain. Salah satu etnis yang paling menarik adalah Minangkabau karena kebiasaan mereka yang disebut merantau¹.”Merantau” adalah istilah yang digunakan oleh orang Melayu, Indonesia yang arti dan pemakaiannya berasal dari kata “rantau”². Bagi masyarakat Minangkabau merantau merupakan suatu proses pendewasaan bagi seorang laki-laki. Penyebab lain dari merantau, yaitu adanya faktor budaya karena orang Minangkabau memiliki budaya dan adat istiadat, adat yang menempatkan laki-laki pada pengangguran, adat juga yang mendorong mereka untuk gigih dalam bekerja karena adat mengharuskan seorang laki-laki untuk pergi merantau. Oleh sebab itu merantau secara suka rela menjadi jalan keluarnya³.

Para perantau orang Minangkabau ini selalu aktif dalam penyebaran ajaran-ajaran agama Islam yang membawakan suara pembaharuan. Peranan mereka dalam bidang ini lebih terasa di Indonesia bagian timur. Perantau orang

¹Mochtar Naim. *Merantau, pola Migrasi Minangkabau*, (Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2013), Hlm,7.

²Rantau ialah kata benda yang berarti daratan rendah atau daerah aliran sungai, di biasanya terletak dekat Ke-atau bagian dan daerah pesisir “merantau” ialah kata kerja ng berawalan “me-” yang berarti “pergi merantau”. lihat Mochtar Naim.*Merantau, la Migrasi Minangkabau*, (Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2013).

³ Mochtar Naim. Loc.cit



Minangkabau yang ada di Kota Makassar, bukan hanya seorang pedagang yang digambarkan pada umumnya tersebar di Indonesia, melainkan perantau Minangkabau di Kota Makassar yang berprofesi sebagai “pekerja otak” dalam hal ini yang dimaksud ialah seorang mubaliq, ulama, guru agama, dan pegawai negeri. Tak jarang mereka justru mendapatkan keberuntungan dan pengaruh yang luar biasa di daerah rantauan mereka. Salah satunya, ialah Ahmad Dara Sjaruddin sebagai salah satu tokoh berpengaruh di Kota Makassar sejak awal kedatangannya pada tahun 1947.

Ahmad Dara Sjaruddin lahir di Matur Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 16 Agustus 1920⁴. Ayahnya bernama Dahar dan Ibunya bernama Darama Kamsiah. Beliau mempunyai seorang isteri yang bernama Helga Emerentia Blaset lahir di Kolonodale Sulawesi Tengah dan telah dianugrahi 5 orang anak, yaitu Heldarsyah Sjaruddin, Chairulsyah Sjaruddin, Bahrumsyah Sjaruddin, Heldalma Sjaruddin dan Rosiana A. Sjaruddin.

Pendidikan Ahmad Dara Sjaruddin dimulai *Hollands Inlandsche School* (HIS) dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Setelah itu melanjutkan ke *Algemene Middelbare School* (AMS) di Surabaya, dan Sekolah Hakim dan Jaksa pada zaman Jepang. Beliau pernah kuliah di Fakultas Kedokteran zaman Belanda dan kemudian kuliah di Fakultas Hukum zaman kemerdekaan di Jakarta. Beliau banyak berkecimpung di organisasi pelajar dan mahasiswa. Terakhir sebagai



⁴Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Arsip opinsi Sulawsemi 1950-1960. No Reg 203. Mengenai Pemilihan Umum, Membahas ilon Walikota Makassar.

pengurus Pemuda Republik Indonesia (PRI) yang merupakan organisasi perjuangan melawan Belanda di Malang dan Surabaya.⁵

Ahmad Dara Sjahrudin juga aktif di bidang politik, antara lain menjadi anggota Dewan Kota, anggota pengurus Pemuda Republik Indonesia (PRI) di Malang, kemudian menjadi pengurus Majelis Syuro Muslim Indonesia (MASYUMI) cabang Sulawesi. Beliau juga pernah menjadi guru di Sekolah Menengah Islam Malang, pengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nasional Makassar dan Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar⁶. Pada awal perantauannya Ahmad Dara Sjahrudin bergerak dikalangan Partai MASYUMI Kota Makassar. Pada Tahun 1948 Ahmad Dara Sjahrudin memegang Pimpinan Sekretariat Dewan Partai MASYUMI sekaligus juru bicara partai MASYUMI⁷. Partai MASYUMI inilah yang akan membawa Ahmad Dara Sjahrudin sebagai calon Walikota Makassar. Berdasarkan Surat Keputusan nomor: U.P._15/2/3 tanggal 15 Juni 1952, Ahmad Dara Sjahrudin diangkat sebagai walikota definitif pertama setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1950 beliau menjalankan beberapa kebijakan program kerja. Di antaranya adalah masalah pembangunan fisik Kota Makassar,

⁵*Ibid*

⁶ Pembangunan Yayasan Wakaf. Lihat Anna Asriani Muchlis, Kampus Hijau di Tengah Perubahan Zaman : Universitas Muslim Indonesia 1954-1965, (Skripsi yang lum diterbitkan :Universitas Hasanuddin , 2013). Hlm. 1.

⁷ Badan Arsip dan Perpustakaan Nasional Kota Makassar, No Reg 203 Arsip op Sulawsesi 1950-1960. 23 Pemilihan Umum, Mengenai Calon Walikota Makassar. arsip dalam keadaan tidak bisa di copy)



Pendidikan, Bidang Kesehatan, Kebersihan Kota, Pengembangan Bidang Olahraga serta pemerintahan⁸.

Berdasarkan uraian penulis di atas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang perantau orang Minangkabau di Kota Makassar. Perantau orang Minangkabau memberi banyak sumbangsih terhadap perkembangan dan pembangunan di Kota Makassar. Khususnya Ahmad Dara Sjahrudin sebagai perantau asal Minangkabau. Penulis tertarik untuk menelusuri karir dan tantangan yang dihadapi Ahmad Dara Sjahrudin sebagai Walikota Makassar periode 1952-1957 dalam mengelolah Kota Makassar.

1.2. BATASAN MASALAH

Penulisan ini khususnya membahas mengenai pemerintahan Ahmad Dara Sjahrudin, yang dimulai dari proses perantauannya ke Kota Makassar hingga menjadi seorang Walikota Makassar. Batas temporalnya yakni tahun 1952-1957. Pada tahun 1952 Ahmad Dara Sjahrudin menjabat sebagai anggota dewan kemudian dipilih menjadi salah satu kandidat calon Walikota Makassar. Beliau dipercayakan memimpin Kota Makassar sebagai Walikota. Ahmad Dara Sjahrudin dilantik pada tanggal 25 Mei 1952 sebagai walikota Makassar. Pada masa itu pemerintahan baru saja mengalami peralihan. Sistem pemerintahan dari pemerintahan Negara Indonesia Timur ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu berbagai krisis terjadi sedangkan penulisan ini berakhirnya tahun 1957 masa jabatannya berakhir.



⁸Nuraeni Ma'mur, *Walikota Makassar Legenda Di Timur, Persembahan 400 tahun Kota Makassar*, Yapensi Jakarta & Pemerintah kota Makassar : 2007, hlm. 46-47

1.3. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan masalah dan sekaligus kebijakan pada masa pemerintahan Ahmad Dara Sjahrudin sebagai Walikota Makassar, ada beberapa pertanyaan penelitian yang akan diajukan. Adapun persoalan-persoalan penelitian yang dimaksud adalah :

1. Bagaimana proses terpilihnya Ahmad Dara Sjahrudin sebagai Walikota Makassar?
2. Kebijakan apa yang diterapkan serta tantangan apa yang dihadapi Ahmad Dara Sjahrudin dalam pengembangan Kota Makassar sebagai walikota Makassar?

1.4. MANFAAT DAN TUJUAN PENELITIAN

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah bacaan tentang sejarah Walikota Makassar
2. Sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

Tujuan dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui proses terpilihnya Ahmad Dara Sjahrudin sebagai Walikota Makassar.
2. Untuk mengetahui tantangan-tantangan apa yang dihadapi Ahmad Dara Sjahrudin dalam mengelola Kota Makassar sewaktu menjabat sebagai Walikota Makassar periode 1952-1957?



1.5. METODE PENULISAN

Tujuan dari penulisan sejarah adalah untuk meninjau kembali dengan menggunakan fakta-fakta sejarah yang ada, serta tidak mengaburkan peristiwa di masa lampau, dengan cara melakukan penelitian setelah mendapatkan objek serta mengumpulkan bahan dari sumber-sumber sejarah yang akan diteliti. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini dimulai heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Adapun dalam tahapan penulisan sejarah dapat dijelaskan sebagai berikut

Di dalam tahap ini, peneliti mencari dan mengumpulkan data dari sumber-sumber sejarah seperti arsip, naskah, surat kabar, dokumen yang bersangkutan mengenai Pemerintahan Walikota Makassar di tahun 1952-1957. Penelusuran berbagai sumber-sumber sejarah seperti sumber arsip di Badan Perpustakaan & Arsip Nasional Daerah Propinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan Ahmad Dara Sjahrudin saat menjadi Walikota Makassar tahun 1952-1957.

Adapun arsip-arsip yang digunakan dalam penulisan ini di antaranya : proses pencalonan Walikota Makassar Ahmad Dara Sjahrudin hingga pelantikannya dengan No.Reg 203 mengenai pemilihan, dan kebijakan dan masalah yang dihadapi Ahmad Dara Sjahrudin saat menjadi Walikota Makassar dengan nomor registrasi 234 mengenai laporan atau warta politik di tahun 1952-1956 dan 155 mengenai laporan atau notulen anggota DPRD di tahun 1952-1956.



Penulisan ini juga dibantu dengan buku-buku tentang tahun 1950an buku “*Kontinuitas & Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*”,

kumpulan sebuah karya yang dituangkan dalam tulisan dengan latar belakang Sulawesi Selatan, dengan penyunting, Dias Pradadimara dkk, Yogyakarta : Ombak, 2004. Selanjutnya disertasi J. R. Chaniago yang berjudul “*Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia : Peranan Pemimpin Lokal Dalam Dinamika Politik Di Sulawesi Selatan Dan Sumatera Timur 1950*”. Menyusul kumpulan tulisan dengan judul “*Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950*”, dengan penyunting Dias Pradadimara, Yogyakarta : PT. Kanisius 2014. Serta buku dengan judul *Republik Indonesia, Propinsi Sulawesi* oleh Kementerian Penerangan.

Adapula karya Mochtar Naim dengan judul “*Merantau Pola Migrasi Minangkabau*”, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013⁹. Serta Biografi “*Pahlawan Palonga Daeng Ngalle Karaeng Polongbangkeng*” (sebagai suatu acuan penulisan), dan karya Anies Baswedan dengan judul “*Politik Lokal di Indonesia*” adalah buku-buku yang digunakan sebagai dasar untuk memulai penulisan ini serta beberapa pinjaman koleksi pribadi untuk menambah referensi melakukan penulisan. Penulis juga mengunjungi beberapa Perpustakaan, seperti perpustakaan pusat dan Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Universitas Negeri Makassar (UNM), Perpustakaan Pasca Sarjana UNM, dan mendapatkan buku seperti “*Gerakan Penduduk, Pembangunan dan Perubahan Sosial, Kasus Tiga Komoditas Padi Sawah di Sulawesi Selatan*”, karya Muhammad Idrus Abustam.



⁹ Mochtar Naim dengan judul “*Merantau Pola Migrasi Minangkabau*”, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013

Selain mengunjungi beberapa toko buku atau perpustakaan serta arsip penulis juga akan mengunjungi rumah yang menjadi kediaman Ahmad Dara Sjahruddin objek dari penelitian ini. Penulis tetap melakukan beberapa penelitian di tempat-tempat di atas mencari beberapa sumber seperti buku-buku, arsip, skripsi, tesis, makalah, jurnal dan surat kabar sampai penulisan selesai.

1.6. TINJAUAN PUSTAKA

Adapun karya tulis yang berhubungan dengan judul skripsi ini di antaranya. Dias Pradadimara, *Kontinuitas & Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*. Yogyakarta, Ombak, 2004. Menjelaskan perubahan sosial kaum migrasi, kondisi Kota Makassar pada tahun 1950, hingga aspek politik dimana terpilihnya Ahmad Dara Sjahruddin sebagai walikota Makassar. Pembahasan buku ini terdapat di bab II, III, IV.

Kementerian Penerangan *Republik Indonesia : Propinsi Sulawesi*, yang memuat banyak mengenai perjuangan kemerdekaan dan keadaan-keadaan yang terjadi di masa NIT serta susunan pemerintahan di Sulawesi Selatan di masa NIT. dalam beberapa Sub babnya yang menjelaskan mengenai kondisi pada tahun 1950-an mulai pemberontakan Andi Azis, Kahar Muzakkar hingga mengenai proses pemilihan anggota dewan pada tahun 1952 hingga pengangkatan Ahmad Dara Sjahruddin sebagai walikota pada tahun yang sama. Pembahasan dalam buku ini terdapat di bab III¹⁰.



¹⁰ Kementerian Penerangan *Republik Indonesia : Propinsi Sulawesi*, (Jakarta : Kementerian Penerangan, 1953)

Disertasi J. R. Chaniago yang berjudul *Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia : Peranan Pemimpin Lokal Dalam Dinamika Politik Di Sulawesi Selatan Dan Sumatera Timur 1950*. Membahas mengenai masalah yang dialami di Sulawesi Selatan dan Sumatera Timur dalam hal nasionalisme dan revolusi Indonesia yang terjadi tahun 1945-1949 yang mencakup sosial-budaya, politik di masa kolonial. Serta beralihnya dari pemerintahan Negara Indonesia Timur ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimulai dari sebuah pemberontakan yang dilakukan Andi Azis menandai jatuhnya Pemerintahan Negara Indonesia Timur. Pembahasan dalam buku ini terdapat dalam bab III¹¹.

Dias Pradadimara. Dkk, “*Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950*”. Jogjakarta : PT Kanisius 2014. Dimana buku ini menjelaskan tentang gerombolan pada masa tahun 50-an yakni Kahar Muzakkar, Andi Azis, serta perkembangan politik pada masa itu dimana pemilihan umum tahun 1955 adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang berdirinya Universitas Muslim Indonesia serta pengaktipan kembali beberapa Fakultas yang sempat dibekukan seperti Fakultas Kedokteran yang merupakan cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. pembahasan dalam buku ini terdapat di bab II, III, IV¹².



¹¹Disertasi J. R. Chaniago yang berjudul *Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia : Peranan Pemimpin Lokal Dalam Dinamika Politik Di Sulawesi Selatan Dan Sumatera Timur 1950*.

¹²Dias Pradadimara. Dkk, “*Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950*”. Jogjakarta : PT Kanisius 2014.

Mochtar Naim, “*Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*”. Jakarta, PT Rajawali Pers, 2013. Menjelaskan tentang pola migrasi yang disebut dengan merantau menjadi adat istiadat dan ketentuan untuk menjadi seorang anak laki-laki menjadi dewasa. Serta penyebab dari Orang-orang melakukan Rantau bukan semata-mata faktor ekonomi melainkan juga karena faktor kebutuhan sebagai pemimpin. Dalam buku ini juga menjelaskan mengenai para rantau Minangkabau yang ada di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan Makassar. pembahasan dalam buku ini terdapat di bab I, II.

Iskandar Kemal. “*Pemerintah Nagari Minangkabau & perkembanganya*” (*tinjauan tentang kerapatan adat*). Jogjakarta : Graha Ilmu. 2009. Menjelaskan Minangkabau, merupakan suatu wilayah yang sangat unik tidak saja terkait adat dan struktur organisasi pemerintahan nageri otonom dengan menekankan musyawarah dan mufakat, tetapi juga tentang nilai norma dan adat istiadatnya¹³.

Barbara Sillars Harvey, “*Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi Ke DI/TII*”, Jakarta : Grafiti 1989. Di mana buku ini membantu dalam kronologi dari periode pemberontakan kahar dan permesta. Buku ini menggambarkan kondisi mulai masuknya Islam pembangunan mesjid-mesjid di Makassar serta pemberontakan yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan hingga permesta. Pembahasan dalam buku ini terdapat di bab II.

Muchlis Paeni, Anhar Gonggong, M Nur Baso (ketua), Sarita Pawiloy, “*Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan Mobilitas Sosial Kota Makassar 1900-* Jakarta : Depertemen Pendidikan dan kebudayaan, 1984. Dijelaskan



¹³Mochtar Naim, “*Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*”. Jakarta, PT Rajawali Pers, 2013.

tokoh-tokoh Minangkabau yang berpengaruh di Kota Makassar. Serta perkembangan pendidikan pada masa Hindia Belanda, hingga pendidikan pada zaman kemerdekaan. pembahasan dalam buku ini terdapat di bab II.

Mattulada dalam bukunya ini ”*Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah*” Jogjakarta: Ombak, 2011. Mattulada mencoba meletakkan Makassar dan Sulawesi Selatan dalam proses dibentuknya Indonesia sebagai suatu etnisitas yang meminjam istilah Ben Anderson yang terkenal “dibayangkan”.

Muhammad Arfah dalam tulisan Biografinya mengenai “*Pojanga Daeng Ngalle, Karaeng Polombangkeng*”. Sulawesi Selatan: Ujung Pandang 1988. Di mana dalam tulisan ini sangat membantu penulis bagaimana tata cara penulisan sebuah Biografi yang sesuai dengan metode penulisan¹⁴.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada bab I menjelaskan mengenai Latar belakang penulisan, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan, metode penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II penulis menjelaskan perantau yang ada di Kota Makassar di mana Ahmad Dara Sjahruddin adalah seorang perantau asal Minangkabau, dalam sub bab ini penulis menjelaskan mengenai salah satu faktor pendukung Ahmad Dara Sjahruddin adalah partai MASYUMI dalam karir politiknya sehingga bisa menjadi seorang Walikota Makassar. Kemudian biografi singkat Ahmad Dara

in sebelum menjadi Walikota Makassar hingga pensiun.

¹⁴Muhammad Arfah “*Pojanga Daeng Ngalle, Karaen Polombangkeng*”. Sulawesi Selatan: Ujung Pandang 1988.



Bab III dalam sub bab ini di mana penulis menjelaskan mengenai proses terbentuknya NKRI setelah itu pemilihan Dewan Kota di dalam sub ini menjelaskan tata cara pemilihan anggota Dewan Kota, jumlah pemilihan dan nama-nama anggota yang terpilih di tahun 1952. Serta proses pemilihan Walikota Makassar hingga terpilihnya Ahmad Dara Sjahrudin sebagai Walikota Makassar.

Bab IV dalam sub ini penulis menjelaskan kebijakan-kebijakan yang dilakukan Ahmad Dara Sjahrudin dalam masa pemerintahannya serta tantangan yang dilalui Ahmad Dara Sjahrudin dalam mengatasi masalah-masalah keuangan, perumahan, pendidikan, dan masalah uang lembur sewaktu beliau memimpin Makassar sebagai walikota.

Bab V dalam sub ini mengenai kesimpulan apa yang dapat diambil dari masa pemerintahan Ahmad Dara Sjahrudin sebagai Walikota Makassar periode 1952-1957.



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. KAUM PERANTAU MINANGKABAU DI KOTA MAKASSAR

Perantau orang Minangkabau yang ada di Kota Makassar mereka disebut dengan rantau yang elit, karena mayoritas perantau di Kota Makassar tidak hanya sebagai pegawai biasa tetapi pegawai yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Dalam daftar milik perkumpulan perantau Minangkabau yang bernama *Sapayuang* bahwa 216 kepala keluarga Minangkabau atau sekitar 1000 anggota keluarga yang berada di Kota Makassar⁷.

Dari daftar itu berbagai profesi dan pekerjaan yang dilakoni oleh para perantau tersebut di antaranya: 5 Dokter, 6 Insyur, 7 Sarjana Hukum, 20 Doktorandus. Kemudian menyusul 26 Letnan, 6 Kapten, 5 Mayor, 1 Letnan Kolonel, 3 Kolonel, 1 Brigadir Jendral, 1 Mayor Jendral, 1 Letnan Jendral dan 14 Perwira Polisi. Di samping itu adapula yang bekerja sebagai dosen di berbagai universitas dengan jumlah 13 Dosen dari Universitas Hasanuddin, IAIN, dan UMI, kemudian ada 12 Guru SLA, dan 5 Jaksa serta 9 yang bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum, 12 pada Dinas Kesehatan, 6 yang bekerja di Bank, 3 pada Jawatan Bea dan Cukai, serta 15 di perusahaan Negara dan 15 di perusahaan swasta⁸. Perantau orang Minangkabau di Kota Makassar bukan lagi elit tetapi



⁷Mochtar Naim. *Merantau, Pola Migrasi Minangkabau*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm 150-151.

⁸*Ibid*

lebih tinggi lagi tingkatannya. Jika dilihat jauh kebelakang orang Minangkabau sudah hadir di Makassar pada abad ke-17⁹.

Tiga ulama tiba di Makassar pada awal abad 17 yang berasal dari Minangkabau Kota Tengah di Sumatera Barat berperan besar di Makassar termasuk dalam mengislamkan orang-orang di Sulawesi selatan¹⁰. Para ulama ini sangat berjasa mengislamkan Raja Goa beserta penasehatnya¹¹. Para ulama tersebut yaitu Datuk Ribandang pada tahun 1607 di Kota Makassar, Datuk Patimang tahun 1603 di Luwu, dan Datuk Ri Tiro di Bulukumba.

Pada tahun 1920 dan 1930-an datanglah beberapa orang Muballigh dari Sumatera Barat dengan membawa gagasan-gagasan pembaruan, yaitu Haji Abdul Karim yang dikenal dengan sebutan Hamka. Mereka tampil sebagai guru dan muballigh dan mendirikan sekolah-sekolah agama yang modern serta meneruskan pesan-pesan mereka melalui media, majalah dan surat kabar.

Para perantau ini mulai berperan penting ketika sekolah modern itu banyak didirikan. Pada tahun 1932 Muhammadiyah mendirikan sebuah lembaga pendidikan calon-calon pendakwah dengan nama *Tabligh School*. Dua tahun setelah berdirinya *Tabligh School* berubah nama menjadi Muallimin Muhammadiyah¹². Kemudian pada tahun yang sama sejenis pendidikan dasar

⁹ Yusuf Abdullah Puar, *Masuknya Islam Ke Indonesia*. (Jakarta : CV. Indradjaya 1981), hlm 133.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar : Dari Tradisi Ke V/III*. (Jakarta :Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm. 35-36.

¹²Setelah masuknya Muhammadiyah pada tahun 1926 di Makassar, Haji Abdul alik Karim Amrullah yang dikenal sebagai Hamka, kembali ke Makassar mendirikan bligh School pada tahun 1932, dan dua tahun berdirinya namanya di ubah menjadi



bernama *Munier School* dibuka, hingga tahun 1932-1940 lembaga pendidikan maupun sekolah yang diasuh Muhammadiyah berjumlah 21 lembaga pendidikan di Makassar. Jumlah keseluruhan adalah 56 lembaga pendidikan dengan murid 5000 orang tersebar di Sulawesi selatan¹³. Dalam kurun waktu 1950-1957, diperkirakan 30-35 guru di Sulawesi Selatan berasal dari luar daerah, tetapi menjelang akhir 60-an jumlah itu hanya 10 persen.

Kasus pernikahan yang berbeda suku meningkat pesat di kalangan perantau Minangkabau di Kota Makassar¹⁴. Dari 216 kepala keluarga yang disebutkan sebelumnya terdapat 45 (21%) pernikahan yang berbeda suku, yang terdiri dari rumah tangga yang istrinya bukan orang Minangkabau dan 18 memiliki suami yang bukan berasal dari Minangkabau¹⁵. Dari istri yang bukan Minangkabau tersebut, 16 di antaranya adalah wanita bugis dan wanita Sulawesi lainnya, sedangkan suami yang bukan berasal dari Miangkabau adalah 10 orang bugis dan Sulawesi lainnya. Kasus yang tinggi dalam pernikahan yang berbeda suku tersebut menggambarkan turunan baru dari generasi Minangkabau yang di rantau sekarang, yang tidak harus lagi menikah dengan anggota kerabat mereka, walaupun dari segi emosinya jelas mereka masih terpaut dengan kampung halaman di Sumatera Barat¹⁶.

Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Sekarang Madrasah ini beralamat di Jl. Muhammadiyah No 51 B.

¹³Muchlis, Paeni. *Sejarah Sosial: Daerah Sulawesi Selatan Mobilitas Sosial Kota Makassar 1900-1950*. (Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1984/1985), hlm. 139.

¹⁴Mochtar Naim, *op.cit.*, Hlm 154-155.

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*



Hal ini juga menggambarkan efek langsung dari kehidupan merantau, di mana setelah menamatkan pendidikan di rantau mereka tidak merasa terikat lagi untuk pulang kampung tetapi mereka memilih bekerja di rantau dan bahkan menikahi gadis yang asalnya bukan dari Minangkabau melainkan pilihan mereka sendiri. Seperti di rantau lainnya, di rantau Indonesia bagian timur inipun masyarakat Minangkabau juga memiliki organisasi sosial sendiri pada umumnya, sama seperti yang lainnya, organisasi tersebut sama-sama mempunyai fungsi dan sama-sama mempunyai tujuan yang serupa. Lantaran jumlah mereka yang sedikit dan adanya perasaan terpencil jauh dari kampung halaman organisasi mereka umumnya kompak lebih aktif serta normal. Di Makassar organisasi Minangkabau di sebut Sapayuang.

2.2. MASYUMI dan Politik Kota Makassar

Di dalam sub ini penulis menjelaskan mengenai partai MASYUMI. Hal ini penting karena partai MASYUMI mempunyai peranan yang besar dalam karir politik Ahmad Dara Sjahrudin, Sehingga beliau dapat menduduki jabatan sebagai Walikota Makassar.

Partai MASYUMI cabang Sulawesi selatan didirikan di Makassar pada tanggal 12 Desember 1949 yang di ketuai oleh M. Noor¹⁷. Partai MASYUMI muncul pada saat terjadi kekacauan politik di Sulawesi selatan. Tepatnya ketika Negara Indonesia akan dikembalikan kedalam bentuk NKRI. Oleh karna itu, masyarakat Sulawesi selatan yang mayoritas beragama Islam memberi banyak



¹⁷Kementrian penerangan. *Republik Indonesia. Propinsi Sulawesi*. (Djakarta: mementrierian Penerangan. 1953), hlm. 387.

dukungan untuk partai MASYUMI, hal ini dapat dilihat pada hasil pemilihan daerah ini¹⁸.

Pada periode antara 1950-1955, partai MASYUMI telah memainkan peranannya di dalam memperjuangkan cita-cita ummat Islam dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Peranan itu tampak dalam menyelesaikan gejala-gejala politik yang terjadi di Sulawesi Selatan dan dalam proses penataan pemerintahan.

Gejala-gejala politik yang muncul di Makassar pada awal tahun 1950-an adalah masalah gerilya yang berlanjut menjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Di samping itu suasana pemerintah di Propinsi Sulawesi pada waktu itu dalam proses peralihan dari pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT) yang bersifat federal kedalam pemerintah republik yang berbentuk kesatuan. MASYUMI salah satu partai yang patut diperhitungkan di Propinsi Sulawesi sejak datangnya terkhusus di Kota Makassar yang sudah menarik banyak perhatian masyarakat. Ini terbukti pada jumlah wakilnya yang mendapatkan kursi Dewan Kota, dan mendominasi kursi-kursi yang ada di Dewan Kota dengan delapan Kabupaten dan Kota di Sulawesi selatan¹⁹.

Partai MASYUMI mendominasi dengan meraih posisi tertinggi dalam perolehan suara yaitu sebanyak 21% menyusul 14,04 % ,PSII 10,59%, Partai Khatolik 8,93 % , LISS 8,75 % dan PARKINDO 8,50 % dengan jumlah tersebut

¹⁸Barbara Sillars Harvey, *Permesta : Perjuangan Setengah Hati*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1989), hlm .41.



¹⁹Burhaman Djunedding, "Pesta Demokrasi di Daerah Bergolak: Politik Tingkat Lokal dan Pemilihan Umum di Sulawesi Selatan", dalam Dias Pradadimara dkk penyunting). *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950*. (Jogjakarta: PT anisius 2014), hlm .62.

MASYUMI meraih 7 kursi dari 25 yang diperebutkan pada pemilihan Dewan Kota 1952²⁰.

Dalam hal ini perjuangan Partai MASYUMI di Sulawesi Selatan terutama di Makassar juga melibatkan tokoh-tokoh politik partai MASYUMI seperti Ahmad Dara Sjahrudin, yang menjadi Walikota Makassar pada saat itu.

2.3. AHMAD DARA SJAHRUDDIN

a. Biografi Singkat

Ahmad Dara Sjahrudin lahir di Matur, Sumatera Barat Pada tanggal 16 Agustus 1920 dan wafat hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014 jam 22.15 wib di RS. Siloam Sudirman Jakarta, dalam umur 94 tahun. Ayahnya bernama Dahar dan ibunya bernama Darama Kamsiah²¹. Ahmad Dara Sjahrudin ini mempunyai seorang isteri yang bernama Helga Emerentia Blaset, lahir di Kolonodale Sulawesi Tengah pada tanggal 25 September 1922 dan wafat pada tanggal 22 Maret 2011 di umur 89 tahun, dari pernikahan tersebut Ahmad Dara Sjahrudin ini dianugrahi 5 anak²². Kelima anak Ahmad Dara Sjahrudin ini menetap di Jakarta karena tutunan pekerjaannya²³.

²⁰*Ibid.*, Hal 63. (hasil pemilihan ini penulis lebih menjelaskan di Bab III).

²¹ Nuraeni Ma'mur, *Walikota Makassar Legenda Di Timur, Persembahan 400 Tahun Kota Makassar*, Yapensi Jakarta & Pemerintah kota Makassar : 2007, hlm. 40.

²²1.Dr. H. Heldarsyah Sjahrudin Sp. THT. Beliau adalah seorang dokter spesialis THT di Rs. Siloam, Semanggi Jakarta. 2.Dr. Chairulsyah Sjahrudin Sp. OBGYN. Beliau adalah seorang dokter spesialis obgyn di Rs. Admira, Pulomas, Jakarta. Dr. Bahrumisyah Sjahrudin Sp. K.K. Beliau adalah seorang dokter spesialis K.K di Rs. Igu PT. Pelindo II Jakarta Utara 4.Dr. Heldalma Sjahrudin Sp. A. Beliau adalah orang dokter spesialis anak di Rs. 5.Dr. Rosiana A. Sjahrudin Sp. RAO. Beliau adalah orang dokter spesialis Radiologi di Rs. RSUD Majene.Nuraeni Ma'mur, *Walikota Makassar Legenda Di Timur, Persembahan 400 Tahun Kota Makassar*, Yapensi Jakarta Pemerintah kota Makassar : 2007, hlm. 46-47.



Masing-masing anak dan menantu Ahmad Dara Sjahrudin adalah seorang dokter begitupun dengan cucunya adalah dokter. Mereka Dokter Spesialis diberbagai Rs²⁴.

Di perantauannya Ahmad Dara Sjahrudin mengawali karirnya dengan menjadi seorang Redaktur pada Pemerintah Kota Malang pada tahun 1943. Beliau mengudurkan diri karena melanjutkan studinya yakni sekolah Kehakiman untuk pendidikan Hakim & Jaksa di Jakarta yang ijazahnya disamakan dengan C II pada perguruan tinggi Hukum, setelah menempuh ujian tambahan lulus dalam ujian untuk C I pada perguruan tinggi bahagian Hukum²⁵. Pada tahun 1944 Ahmad Dara Sjahrudin kembali ke Kota Malang sebagai Hakim Muda di Pengadilan Negeri Malang.

Dimasa pelajar dan Mahasiswa Ahmad Dara Sjahrudin banyak berkecimpung di organisasi pelajar dan mahasiswa. Terakhir sebagai pengurus Pemuda Republik Indonesia (PRI) yang merupakan organisasi perjuangan melawan Belanda di Malang dan Surabaya

Ahmad Dara Sjahrudin bukan hanya sebagai Hakim Muda di Kota Malang beliau juga sebagai guru Sekolah Menengah Pertama SMP Perjuangan

²³ Lihat Lampiran X dan XI Ahmad Dara Sjahrudin & Istri beserta anak cucunya, hal 90-95.

²⁴ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Imran (50 th), keponakan Ahmad Dara Sjahrudin, yang bertugas menjaga rumah tersebut hingga kini. Makassar Jl. utumahina no 4 jam 11 pagi tanggal Februari 2015.

²⁵Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Arsip Pemerintah Sulawesi 1950-1960 No.Reg 203 mengenai biodata singkat calon DPR Kota akassar Ahmad Dara Sjahrudin.



dan guru Sekolah Menengah Islam di Kota Malang. Dan seorang pengajar pada Balai Pengetahuan Rakyat *volksuniversiteit*²⁶.

Ahmad Dara Sjaruddin ini berdomisili di Jl. Latumahina No. 4 (49 lama) di Kota Makassar. Memulai perantaunanya di Kota Makassar pada tahun 1947, dan pada tahun 1948 Ahmad Dara Sjahrudin memegang pimpinan sekertariat dewan partai MASYUMI dan menjadi juru bicara dewan partai MASYUMI wilayah Sulawesi. Pada tahun 1949 Ahmad Dara Sjahrudin bekerja sebagai redaktur pemerintah Kota Makassar. Tahun 1950 Ahmad Dara Sjahrudin diangkat sebagai sekretaris Kota Makassar, pada tahun 1951 Ahmad Dara Sjahrudin berhenti menjadi sekretaris Kota Makassar karena adanya perbedaan pendapat dengan pemerintah pada waktu itu.

Ahmad Dara Sjahrudin terpilih sebagai anggota Dewan Kota²⁷ di tahun 1952. Lalu Ahmad Dara Sjahrudin diangkat menjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah (DPD) yang dipilih oleh anggota Dewan Kota kemudian bertugas dibidang Hukum dan Umum. Sewaktu Ahmad Dara Sjahrudin terpilih sebagai anggota Dewan Kota pada saat umurnya masih terbilang muda yakni 32 tahun²⁸.

Pada tahun yang sama, Ahmad Dara Sjahrudin masuk dalam pencalonan sebagai walikota dari 4 kandidat di antaranya 1. Ahmad Dara Sjahrudin. 2. Rajab Dg Masikki. 3. Abdul Hamid Dg Magassing dan 4. Andi Patoppoi. Dari keempat calon tersebutlah dikirim ke Mendagri melalui Gubernur Sudiro. Karena yang



²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

memutuskan adalah pemerintah pusat, sehingga Menteri Dalam Negeri yakni Muh. Roem memutuskan Ahmad Dara Sjahrudin yang menjadi Walikota Makassar Periode 1952-1957, sesuai SK. Mendagri Nomor: U.P_ 15/2/3 tanggal 15 juni 1952, dan mulai saat itu Ahmad Dara Sjahrudin resmi diangkat sebagai walikota²⁹.

Sebagai orang yang pernah mengenyam dunia pendidikan kedokteran, Ahmad Dara Sjahrudin adalah walikota yang sangat memperhatikan bidang kesehatan dan hal inilah yang menjadi masalah dalam awalnya sebagai Walikota Makassar yang pada saat itu pemerintah kota tidak mempunyai seorang dokter pun. Oleh karena itu, Ahmad Dara Sjahrudin melakukan perbaikan poliklinik dan mencari tenaga dokter paramedis (mantri) di Jawa bernama Dokter Malteur. Usaha penyehatan warga Kota Makassar tak hanya sebatas penyediaan sarana kesehatan tetapi juga menjaga kebersihan kota.

Ahmad Dara Sjahrudin selain meningkatkan pelayanan kesehatan, juga meningkatkan pendidikan yakni turut mendirikan Universitas Muslim Indonesia. Di mana pada waktu itu beberapa pegawai Kantor Penerangan Agama di Kota Makassar yang berasal dari Sumatera Barat berperan penting dalam perintisan pembagunan UMI dengan mencari dukungan dari para tokoh masyarakat Sulawesi Selatan. Hal itu terlihat dengan terbentuknya yayasan wakaf UMI yang dari beberapa orang yang salah satunya Ahmad Dara Sjahrudin³⁰.



²⁹ Lihat Lampiran V, VI, VII, VIII calon-calon Walikota Makassar hingga lantiknya Ahmad Dara Sjahrudin, hlm. 83-86.

³⁰Lihat Anna Asriani Muchlis, Kampus Hijau di Tengah Perubahan Zaman : Universitas Muslim Indonesia 1954-1965, (Skripsi yang belum diterbitkan :Universitas asanuddin , 2013), hlm 49-53.

Ahmad Dara Sjahrudin juga turut andil dalam berdirinya Fakultas Kedokteran cabang Universitas Indonesia di Kota Makassar yang dibekukan, sehingga hal inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Hal ini terlihat jelas pada tahun 1956 di mana Universitas Hasanuddin didirikan dengan 4 Fakultas, yakni Fakultas Kedokteran, Ekonomi, Hukum, Kemasyarakatan. Keputusan ini diperkuat dengan peraturan pemerintah No. 23 tahun 1956 yang ditanda tangani oleh wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 8 September³¹.

Keberhasilan Ahmad Dara Sjahrudin dalam mengelolah Kota Makassar terbukti Pada tahun 1955, beliau terpilih sebagai anggota Parlemen pada Pemilihan Umum pertama, kemudian dari hasil pemilihan tahun 1955 tersebut barulah diresmikan di tahun 1956. Ahmad Dara Sjahrudin sebagai anggota partai mempunyai konsekuensi diterapkannya disiplin partai, merundingkan segala keputusan mengenai langkah yang harus diambil dalam karir politiknya. Sehingga kembalinya Ahmad Dara Sjahrudin dari Jakarta untuk menemui Muh. Natsir sebagai Ketua Umum partai MASYUMI.

Dengan dukungan Muh. Natsir, Ahmad Dara Sjahrudin melepas jabatan walikotanya dan maju sebagai anggota parlemen, sehingga menurut peraturan



³¹Dias, Pradadimara, "Kronika Sulawesi Selatan di Tahun 1950an", dalam Dias adadimara dkk (Penyunting). *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950*. ogjakarta: PT Kanisius 2014), hlm .18.

tidak boleh di rangkap atas seorang walikota sekaligus DPR RI secara bersamaan. Hingga tahun 1960 Ahmad Dara Sjahrudin pensiun sebagai anggota DPR RI³².

Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya kepada bangsa dan negara Ahmad Dara Sjahrudin telah dianugerahi beberapa tanda jasa/ kehormatan, antara lain:

1. Warga kehormatan di Kota Makassar.
2. Penghargaan atas pelaksanaan pemilu I untuk DPR dan Konstituante.
3. Penghargaan dari Fakultas Ekonomi dan Kedokteran Unhas.
4. Serta Penghargaan dari Universitas Hasanuddin.

A. Harapan Ahmad Dara Sjahrudin

Untuk pengembangan sebuah kota, perlu ditentukan sebuah peraturan-peraturan yang sifatnya agak permanen, agar peraturan tersebut dapat ditaati oleh semua walikota dan walikota selanjutnya seperti sebuah planning untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Ahmad Dara Sjahrudin mengharapkan sebuah peraturan untuk pengembangan Kota Makassar di masa depan yang bisa berjalan tanpa banyak perubahan-perubahan³³.

Pemeliharaan objek pariwisata menjadi salah satu tujuan Ahmad Dara Sjahrudin dikarenakan dapat menambah penghasilan daerah. Mantan walikota Ahmad Dara Sjahrudin menganggap Kota Makassar adalah kesenangan tersendiri mengingat Kota Makassar adalah sebuah kota transit. Oleh karena itu,



³²A. Lili Evita Wawancara Dengan Ahmad Dara Sjahrudin pada tanggal 13 ni 2014. Di rumah dr. dr.Bahumsjah Dara Sj /Ruddy Jln.Cipinang Jaya II no 52. karta Timur.

³³Nuraeni Ma'mur, *Walikota Makassar Legenda Di Timur, Persembahan 400 ihun Kota Makassar*, Yapensi Jakarta & Pemerintah kota Makassar : 2007. Hlm. 46-47.

pantai Losari yang mejadi tempat pariwisata menjadi kebanggaan warga Makassar dapat di jaga sebaik-baiknya.

Pada masa pemerintahannya Ahmad Dara Sjahrudin wilayah Kota Makassar terdiri dari empat distrik (yang sekarang Kecamatan) yaitu: Distrik Wajo dan Distrik Makassar yang di kepalai oleh Kapitang, sedangkan kepala Distrik Mariso dan Ujung Tanah yang di kepalai oleh Gallarang³⁴. Keempat distrik dibawah oleh kampung-kampung yang juga dikepalai kampung yang dipilih oleh para laki-laki dewasa disana, distrik yang memiliki kepala kampung antara lain Kampung Mangkura dan Kampung Melayu³⁵.

Ahmad Dara Sjahrudin Adalah Walikota yang beruntung hingga saat kematiannya 7 Oktober 2014 di umur 94 tahun³⁶. Beliau masih bisa menyaksikan jalan panjang perjuangannya dilanjutkan oleh para walikota selanjutnya. Perjuangannya dalam membuka jalan ketika Makassar terus membenah diri dan berkembang menjadi kota yang sangat penting di Republik ini.

³⁴Dias Pradadimara, “Dari Makassar Ke Makassar: Proses Etnisasi Sebuah Kota” dalam *Kontinuitas dan Perubahan Dalam Sejarah Sulawesi Selatan*, Dias adadimara, Muslimin A. R. Effendy (Penyunting). (Jogyakarta: Ombak, 2004), hlm. 10-191.

³⁵*Ibid.*

³⁶Lihat Lampiran XI Makam Ahmad Dara Sjahrudin & Isteri, hlm 94-95.



BAB III

PEMILIHAN DEWAN KOTA DAN PEMILIHAN WALIKOTA 1952

3.1. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditandai dengan runtuhnya pemerintahan Negara Indonesia (NIT) Pada tanggal 5 April 1950. Disebabkan oleh pemberontakan yang dilakukan Andi Azis, saat itu menyerbu tangsi yang ditinggali oleh perwira dan pasukan TNI, mereka telah dipersiapkan menjadi bagian dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) mengakibatkan suasana di Kota Makassar tidak stabil karena kekacauan.

Dalam hal ini pemberontakan yang terjadi pada tanggal 5 April tersebut, yang dilakukan oleh Andi Aziz dengan mengatas namakan dirinya sebagai bahagian dari NIT justru menjadi awal dari kehancuran pemerintah NIT. Sebab gerakan Andi Aziz ini memancing emosi pendukung yang pro akan Republik, para demonstran membuat poster, spanduk, mosi, serta pernyataan desakan terhadap pembubaran NIT dan bergabung dengan Republik Indonesia³¹. Berakhirnya peristiwa Andi Aziz, seolah-olah menjadi simbol berakhirnya pengaruh NIT di Indonesia bagian timur, namun bukan berarti berakhirnya konflik antara KNIL dan TNI begitu pula dengan masalah gerilya³².



³¹Chaniago, J. R. *Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia: Peranan mimpin Lokal Dalam Dinamika Politik Lokal Di Sulawesi Selatan Dan Sumatera mur*. (Disertasi yang belum diterbitkan: Universitas Gajah Mada, 2002). Hlm. 551-552.

³²Dias, Pradadimara, "Kronika Sulawesi Selatan di Tahun1950an", dalam Dias adadimara dkk. (Penyuting). *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950*. ogjakarta: PT Kanisius 2014), hlm .13.

Pada tanggal 19 Mei 1950 diadakannya pertemuan antara RIS-RI dalam membentuk NKRI, pada saat itu RIS sudah mendapat mandat dari NIT dan NST yang setuju dalam pembentukan NKRI. Sehingga saat mencapai kesepakatan pada tanggal 19 Mei maka dibentuklah panitia dalam pembentukan NKRI serta penandatanganan piagam persetujuan pemerintah RIS dan RI³³.

Hasil dari kerja keras yang dilakukan oleh anggota delegasi RIS-RI di bawah kepemimpinan Moh. Hatta dan Abdul Halim dalam pembentukan NKRI terlihat pada 15 Agustus 1950 di mana keluarnya sebuah piagam terbentuknya NKRI sebagai berikut :

Piagam

Pernyataan Terbentuknya Negara Kesatuan Indonesia

Dengan ini kami memberitahukan kepada rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat, bahwa Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, yang disusun oleh Pemerintahan dengan persetujuan para pemerintah Daerah-daerah Bahagian Republik Indonesia Serikat, diterima baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat dalam rapat-rapatnya tanggal 14 Agustus 1950.

Pada hari ini, tanggal 15 Agustus 1950 naskah Undang-undang tersebut telah kami tanda tangani dan ditanda tangani serta oleh Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat serta diumumkan oleh Menteri Kehakiman

Berdasarkan proklamasi Kemerdekaan Indonesia Serikat tanggal 17 Agustus 1945 maka kami atas nama Rakyat pada tingkatan perjuangan-kemedekaan sekarang ini menyatakan perubahan dalam negeri terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi seluruh tanah air dan segenap bangsa Indonesia³⁴.

Jakarta, 15 Agustus 1950

Soekarno



³³*Ibid.*, Chaniago, J. R. Hlm. 578.

³⁴*Ibid.*, Chaniago, J. R. Hlm. 690.

Sejak keluarnya piagam ini maka dengan sendirinya berakhirilah riwayat Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia Serikat, dan Negara Kesatuan Indonesia meliputi seluruh tanah air bangsa Indonesia.

3.2. Proses Pemilihan Dewan Kota Tahun 1952

Pada masa kemerdekaan, di awal terbentuknya NKRI ditandai dengan masalah gerilya sampai dengan masalah desentralisasi kekuasaan. Pemerintah pusat lalu dituntut untuk melaksanakan desentralisasi kekuasaan atau dengan kata lain memberikan kekuasaan penuh pada pemerintah daerah. Di mana suatu bentuk pemerintahan, yang mana kedaulatan dan kekuatan politik dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah³⁵. Oleh karena itu desentralisasi³⁶ sangat diterima sebagai bagian yang penting bagi demokrasi yang baru di Indonesia. Namun desentralisasi ini sangat sulit untuk diterapkan di Indonesia Bagian Timur dikarenakan wilayah ini adalah bekas wilayah NIT, sehingga wilayah tersebut tidak dapat dibentuk daerah-daerah otonom tingkat Propinsi disebabkan UU NIT No. 44 tahun 1950 yang di dalamnya tidak menyebutkan adanya kemungkinan untuk membentuk daerah tersebut. Hal ini karena UU NIT No.44 tahun 1950 tidak mengenal daerah Propinsi otonom. Berbanding dengan UU RI No. 22 tahun 1948 yang mengenal daerah otonom tingkat Propinsi, Kabupaten

³⁵Burhaman Djunedding, "Pesta Demokrasi di Daerah Bergolak: Politik Tingkat Lokal dan Pemilihan Umum di Sulawesi Selatan", dalam Dias Pradadimara dkk (Penyuting). *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950*. (Jogjakarta: PT anisius 2014). Hlm .50.

³⁶ Desentralisasi adalah suatu sistem pemerintahan yg lebih banyak memberikan kuasa kepada pemerintah daerah atau penyerahan sebagian wewenang pimpinan pada bawahan.



Kota Besar dan Kota Kecil³⁷, maka sebagai akibatnya pada saat dibentuknya daerah Propinsi Sulawesi, sehingga dalam susunan daerah pemerintah di tingkat bawahnya disebut sebagai Kabupaten atau dalam UU kelak akan disebut daerah tingkat II. Oleh sebab itulah dalam persiapan penyusunan ulang daerah ini, maka pada tanggal 6 September 1951 diumumkan PP No.56 tahun 1951³⁸ mengenai pembekuan Dewan Kota dan DPD Sulawesi selatan yang ada sejak masa NIT³⁹.

Setahun setelah pembekuan Dewan Kota dan DPD, maka melalui PP No. 56 sehingga dibentuk 7 Daerah Swatantra, yakni Makassar, Bantaeng, Bone, Pare-pare, Mandar Luwu, dan Sulawesi Tenggara. Adanya status swatantra⁴⁰ menjadi sangat penting dan mengacu pada otonomi daerah yang harus memiliki kelengkapan Dewan Kota, hal ini menjadi peran dari wujud warga daerah ini dan 7 daerah ini merupakan daerah yang wilayah Sulawesi Selatan sebelumnya⁴¹.

Berdasarkan surat akting Gubernur Sulawesi Sudiro tertanggal 9 Mei 1951 no. 225 mengenai pemelihan anggota Dewan Kota Makassar, maka pada tanggal 3 Februari 1952 di Kota Makassar telah dilangsungkan pemilihan 25 anggota Dewan Kota Makassar Secara langsung.

³⁷*Ibid* .

³⁸Isi Peraturan Pemerintah PP No. 56 tahun 1951, a). Pembekuan Dewan Kota dan DPD Sulawesi Selatan, b). Persiapan Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan c). Pembagian wilayahnya dalam lingkungan Daerah Otonom Propinsi Sulawesi.

³⁹Dias Pradadimara., *op cit*. Hlm 15.

⁴⁰Swatantra adalah suatu daerah dalam suatu negara yang mempunyai pemerintahan sendiri yang bebas dan tidak terikat oleh peraturan seperti halnya daerah lain yang bukan daerah otonomi. Suatu daerah di beri sistem swatantra atau otonom jika daerah tersebut memiliki keadaan geografi yang unik dimana penduduknya merupakan inoritas di negara tersebut sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus, yang hanya cocok diterapkan untuk daerah tersebut.

⁴¹Dias Pradadimara., *op cit*. Hlm 15-16.



Pemilihan Anggota-anggota Dewan Kota di Kota Makassar yang sebagai mana diketahui sejak adanya surat keputusan Ackting Gubernur Propinsi Sulawsemi tanggal 9 Maret 1951 no. 225⁴². Tentang bagaimana suasana pemilihan dan hasil dari pada pemilihan itu telah ditetapkan rentetan-rentetan dari jalannya pemilihan tersebut.

Rentetan-rentetan jalanya pemilihan dimulai dengan dilakukannya pendaftaran di berbagai kampung masing-masing, sesuai dengan pasal 2 peraturan tersebut bagi orang-orang yang sudah tinggal dalam kota selama sekurang-kurangnya 6 bulan.

Pada tahun itu jumlah penduduk Kota Makassar mencapai taksiran 264.224 jiwa⁴³, oleh karena itu, segala usaha untuk menarik minat penduduk dalam keikut sertaanya dalam pemilihan ini, maka pemugutan suara diadakan diberbagai tempat untuk melancarkan pemilihan, sehingga pemugutan suara diadakan di empat tempat.

Tempat-tempat pemungutan suara dilengkapi dengan ruangan tertutup untuk mengisi kartu suara. Bagi mereka yang melakukan kesalahan dalam pengambilan suara karena surat suara rusak, maka panitia setempat akan memberikan kesempatan terakhir untuk ikut dalam pemilihan.

Dalam pemilihan ini didasari oleh peraturan tentang pemilihan oleh karena itu sesuai dengan peraturan tentang pemilihan ketua dan wakil ketua Dewan Kota



⁴² Kementerian Penerangan. *Republik Indonesia. Propinsi Sulawesi*. Hlm .182.

⁴³ *Ibid.* Hlm. 192.

Makassar. Peraturan Pemerintah No.1A Tentang Pemugutan Suara maka dilakukan dengan menurut pasal⁴⁴

Hasil dari pemilihan anggota dewan terdiri dibeberapa distrik di Kota Makassar adalah sebagai Tabel berikut berikut:

Tabel I: Jumlah Penduduk Berdasarkan Distrik dan Yang Ikut Dalam Pemilihan⁴⁵.

No	Nama Distrik	Jumlah Penduduk	Ikut pemilihan
1	Mariso	1781	877
2	Makassar	4905	1554
3	Wajo	2846	680
4	Ujung Tanah	1301	572

Jika dilihat dari tingginya jumlah penduduk yang ada di distrik-distrik Kota Makassar pada waktu itu tidak sebanding dengan yang datang ke Tempat Pemungutan Suara TPS. Tingginya angka golput yang terjadi di Kota Makassar ini menjadi sangat prihatin. Hal ini disebabkan karena kurangnya persiapan-persiapan dan sosialisasi panitia pemilihan di masyarakat yang mana turut andil dalam pemilihan sehingga dapat memperbaiki kehidupan mereka dengan menentukan sendiri pemimpinnya.

Melihat jumlah penduduk Kota Makassar mencapai taksiran 264.224 jiwa⁴⁶ dan berhak memilih sebanyak 260.000 jiwa, tetapi jumlah penduduk yang

⁴⁴ Lihat Lampiran III, hlm 78.

⁴⁵Kementerian Penerangan., *op cit.* hlm. 192.

⁴⁶ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang 1926-1988 No.Reg 1480 mengenai jumlah penduduk di tahun 1950-1960 mencapai taksiran 367.882 jiwa.



mendaftarkan namanya 10.833 pemilih, berarti hanya 4,16 % dari jumlah penduduk yang datang untuk mendaftarkan namanya⁴⁷.

Jumlah penduduk yang mendaftarkan namanya sebanyak 10.833 pemilih, dan yang melakukan pengambilan suara hanya 3683 atau 29% saja. Dari 3683 suara ini, ada sebanyak 246 suara yang tidak sah, disebabkan salah mengisi petak-petak yang telah ditentukan, ada pula yang tidak menghitamkannya, tetapi hanya sekedar menulis calon yang dikehendaknya⁴⁸.

Dengan demikian, daftar nama partai atau organisasi yang terdiri dari 17 partai dan organisasi.

Daftar calon ada 17 sebagai Tabel 4⁴⁹ berikut:

Tabel II : Nama-nama Partai dan Jumlah calon

No	Daftar Nama Partai/organisas	Jumlah Calon
1.	Partai Buruh	4
2.	MASYUMI	14
3.	PERTIB	1
4.	LIM	3
5.	PARKINDO	5
6.	PARINDRA	5
7.	Tidak Berpartai	1
8.	PIR	3
9.	Partai Khatolik	3
10.	ISBIE	2
11.	PKR	9
12.	PSII	1
13.	PSI	5
14.	PDI	2
15.	Organisasi Buruh Indonesia	1
16.	SBPU	1
17.	LISS	7

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid..*

⁴⁹*Ibid.*



Jumlah calon yang tertera diatas di mana partai MASYUMI lah yang dengan calon terbanyak yakni 14 calon, disusul PKR 9 calon dan LISS 7 calon. Banyaknya jumlah calon tergantung pada kapasitas partai itu sendiri seperti MASYUMI dengan 14 calon hal ini juga disebabkan Partai MASYUMI muncul pada saat terjadi kekacauan politik di Sulawesi selatan. Tepatnya ketika Negara Indonesia akan dikembalikan kedalam bentuk NKRI. Oleh karna itu, masyarakat Sulawesi selatan yang mayoritas beragama Islam memberi banyak dukungan untuk partai MASYUMI, hal ini dapat dilihat pada hasil pemilihan daerah ini⁵⁰. Begitupun dengan LISS dan PKR.

Dengan demikian, maka untuk mendapatkan sejumlah kursi yang telah disediakan, yaitu 25 buah maka pemilihan selanjutnya diubah dan didasarkan kepada pasal 62 yang menjelaskan tentang mekanisme cara pemilihan anggota DPR agar dapat mencapai kuota kursi dari peraturan DPR ini pada akhirnya diperoleh hasil yang selengkapnya sebagai tabel berikut⁵¹:

Tabel III: Hasil Pemilihan Dewan Kota

No	Nama Partai	Suara	Jumlah Kursi
1	MASYUMI	682	7
2	PKR	456	4
3	Partai Katolik	290	2
4	LISS	284	2
5	PARKINDO	276	2
6	LIM	254	2
7	PSII	244	1
8	Partai Buruh	186	1



⁵⁰Barbara Sillars Harvey, *Permesta : Perjuangan Setengah Hati*, (Jakarta: Rafiti Pers, 1989), hlm .41. untuk lebih jelasnya lihat pada bab II, hal.16.

⁵¹*Ibid* .

9	PARINDRA	174	1
10	PSII	117	1
11	Pemuda Demokrat	110	1
12	PIR	101	1

Pemungutan suara yang dilakukan dari hasilnya bisa dilihat diatas 12 partai atau organisasi yang mendapat suara dan menjadi Dewan Kota dari 17 parta atau organisasi hanya 12 yang mencukupi untuk kursi anggota dewan.

Sedangkan calon yang tidak berpartai Usmany, Organisasi Buruh Proletar, Pertib, S.B. Umum dan Isbie/front pemuda Indonesia. Tak sampai mendapat kursi kerana masing-masing hanya mendapat 70, 53, 34, 6, dan 27 suara⁵².

Dengan demikian pemilihan inipun berjalan cukup lancar dan teratur serta dihadiri oleh gubernur Sudiro meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak yang kurang memuaskan. Namun dengan bantuan-bantuan dan pentunjuk yang di berikan oleh pihak Departemen Kotapraja seperti bantuan hasil perhitungan. Setelah pemilihan pada tahun 1952 tersebut dengan hasil di mana partai MASYUMI lah yang kelihatan menonjol dibandingkan dengan partai lain karena banyaknya kursi yang MASYUMI dapatkan.

Berikut nama-nama anggota Dewan Kota Makassar 1952 dari masing-masing partai dan organisasi yang baru dipilih sebagai tabel berikut⁵³:

Tabel IV: Nama-nama Anggota Parlemen dan Partai Yang Terpilih

No	Nama Partai/ Organisasi	No	Nama Anggota DEWAN KOTA
		1.	Ahmad Dara Sjahrudin
		2.	Abbas Dg. Mallawa
		3.	Mohammad Noor

⁵²Ibid, hlm, 194.

⁵³Ibid.



1.	MASYUMI	4.	Sitti Ebong
		5.	Abd. Rachim Munier
		6.	Rafiuddin
		7.	Ismail Napu
2.	PKR	1.	Ch. Salawati
		2.	M. Towoliu
		3.	M. Zajad
		4.	Supangat
3.	Partai Khatolik	1.	Ngantung
		2.	Niapali
4.	LISS	1.	Sjamsuddin Qadar
		2.	Salim Dg. Sitaba
5.	PARKINDO	1.	Caunang
		2.	Sumbung
6.	LIM	1.	Latupeirissa
		2.	Manusama
7.	PSII	1.	Sutan Muhammad Yusuf Samah
8.	Partai Buruh	1.	Sjamsuddin Dg. Magawing
9.	PARINDRA	1.	Haeba Dg. Situdju
10.	PSI	1.	Jusuf Mewengkang
11.	Pemuda Demokrat	1.	La Side
12.	PIR	1.	Injte Ibrahim Dg. Mile

Dilihat dari hasilnya partai MASYUMI yang mempunyai banyak suara terbanyak terlihat dari jumlah kursi yang didapatkan sebanyak 7 dari 25 kursi yang diperebutkan di antara partai yang lain, berikutnya partai PKR dengan 4 kursi dan Partai Khatolik, LISS, PARKINDO, LIM, mendapat 2 kursi dan selebihnya 1 kursi saja.

Dari hasil pemilihan Dewan Kota tersebut maka ditunjuklah Sutan Muhammad Jusuf Samah sebagai ketua dari Dewan Kota sedangkan Dewan Pemerintah Daerah⁵⁴ yang telah terbentuk pada bulan April 1952 diketuai oleh



⁵⁴Aparatur Pemerintah Daerah dari UU 1945. Pasal 13. Wewenang utama I DPD lah menjalankan pemerintah sehari-hari. Baik dari keseluruhan DPD maupun masing-masing dari tugasnya bertanggung jawab kepada DPRD dan menjadi instansi pengawas terhadap daerah-daerah setingkat dibawahnya. DPRD berhak memberhentikan anggota PD yang dipilihnya.

Ahamd Dara Sjahrudin dari MASYUMI wakil ketua Ch. Salawati dari PKR, sedang anggotanya terdiri dari M. Noor dari MASYUMI, Latuperisa dari LIM, Sjamsuddin Dg. Mangawing dari Partai Buruh⁵⁵.

3.3. Proses Pemilihan Walikota Makassar Tahun 1952

Tahun 1950an merupakan tahun yang penting pada abad 20 bagi rakyat Indonesia. Karena pada tahun itu pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu kembalinya Negara menjadi Negara kesatuan, dengan kata lain 1950-an adalah peralihan pemerintahan pada masa Negara Indonesia Timur NIT ke Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

Berakhirnya pemerintahan Jepang pada tahun 1945 disebabkan oleh kealahannya pada sekutu, mulai pada saat itulah peranan Yamasaki sebagai Walikota Makassar pada zaman Jepang tahun 1942-1945 berakhir. Sehingga Kota Makassar dipimpin oleh NICA yang membentuk kembali pemerintah kota yakni D.M Van Zwiellen namun tidak bertahan lama karena pada tahun 1947 harus menyerahkan jabatannya pada kaum bumiputera, yaitu Abdul Hamid Dg. Magassing⁵⁶.

Abdul Hamid Dg. Magassing adalah walikota bumiputera pertama di Kota Makassar selama masa Pemerintahan Hindia Belanda dan tepatnya pada tahun 1947. Namun sistem pemerintahan Negara pada saat itu masih belum stabil, karena sistem pemerintahan belum bisa sepenuhnya lepas dari pemerintahan Belanda. Hal ini bisa dilihat pada sistem pemerintah di Kota Makassar yang

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Dias Pradadimara, "Dari Makassar Ke Makassar: Proses Etnisasi Sebuah Kota" dalam Dias Pradadimara, Muslimin A. R. Effendy (penyunting). *Kontinuitas dan Perubahan Dalam Sejarah Sulawesi Selatan*. (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm. 192.



masih dipengaruhi oleh sistem pemerintah kolonial⁵⁷. Sistem pemerintah kolonial adalah salah satu contoh sistem peninggalan Belanda yang masih digunakan saat itu adalah pemerintah Kota Makassar masih bersifat *collegial* atau pemerintahan bersama sehingga pemerintah kota Makassar terdiri dari:

1. Walikota
2. *College van Burgemeester en Wethouders* (Dewan Pemerintahan Daerah).
3. *Gemeente Raad*.(Dewan Kota).

Pada September 19, Kota Makassar tidak memiliki walikota dikarenakan menteri-mentri dan walikota NIT termasuk Abd Hamid Dg. Magassing selaku walikota dipanggil ke Jakarta seolah mereka disana menjadi tahanan⁵⁸. Sehingga ketika walikota Abdul Hamid Dg Magassing tidak menjalankan tugasnya sebagai walikota maka secara otomatis yang bertugas menggantikan ketua adalah *college van Burgemeester en wethouders* yakni J. M. Qaimuddin, J. Mewengkang, Sampara Dg.Lili. Tetapi tahun 1951 J.M. Qaimuddin Pada tahun 1950-1952 tersebut pemerintahan Kota Makassar di pimpin oleh 3 orang yakni J. M. Qaimuddin, J. Mewengkang, Sampara Dg.Lili mereka adalah anggota dari *college van Burgemeester en wethouders*, tetapi pada tanggal 5 Januari 1952 Sampara Dg. Lili minta diberhentikan karena sakit, maka tugas Walikota Makassar sampai ditetapkannya Walikota yang baru di serahkan kepada Gubernur Sulawesi Sudiro.

Pada saat itu sudah terbentuk Dewan Kota dari beberapa partai, antara lain MASYUMI, Partai Kedaulatan Rakyat, Lembaga Indonesia Maluku,



⁵⁷Nuraeni Ma'mur, *Walikota Makassar Legenda Di Timur, Persembahan 400 thun Kota Makassar*, Yapensi Jakarta & Pemerintah kota Makassar : 2007, hlm. 35-36.

⁵⁸A.Lili Evita, Wawancara yang dilakukan dengan Ahmad Dara Sahrudin pada tanggal 15 Juni 2014 di Jakarta.

PARKINDO, Partai Buruh, PSII, Partai Khatolik, LISS, PSI, PARINDRA, Pemuda Demokrat dan PIR. Dalam pemilihan Dewan Kota tersebut Partai MASYUMI lah yang terlihat menonjol dengan 7 kursi yang di perolehnya, disusul dengan PKR mendapat 4 kursi terbanyak kedua setelah MASYUMI, dan selebihnya mendapat 2 kursi di antaranya, PKR, Partai Khatolik, LISS, PARKINDO, dan LIM. Sedangkan yang mendapat 1 kursi PSSI, Partai Buruh, PARINDRA, PSI, Pemuda Demokrat dan PIR. Ahmad Dara Sjahrudin sebagai anggota partai MASYUMI, yang ikut dalam pemilihan tersebut, mendapat kursi, sehingga dari pemilihan anggota dewan ini terpilih lagi sebagai dewan pemerintah harian bertugas di bahagian Hukum dan Umum.

Sebelum terbentuknya Dewan Kota banyak kalangan yang mendesak pemerintah agar supaya Abd. Hamid Dg. Magassing dikembalikan kedudukannya sebagai walikota. Di mana pada saat itu Abd. Hamid Dg. Magassing yang di nonaktifkan dari jabatan walikota karena tindakan kekerasan dan gerakan yang dilakukan Andi Aziz mendapat dukungan dari organisasi buruh di Kota Makassar di antaranya SBII, PERBUKOM, PTBK, Persatuan Buruh Pasar dan Persatuan Buruh Air-pipa dengan mengirimkan pernyataan bersama secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi pada tanggal 22 Nopember 1951⁵⁹. Namun hal ini tidak mendapat respon hingga terbentuknya Dewan Kota pada tahun 1952.

Lumpuhnya pemerintahan atas kekosongan yang terjadi pada jabatan walikota di Makassar sehingga dilakukanlah rapat pada tanggal 29 Maret 1952,



⁵⁹Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Arsip merintah Sulawesi 1950-1960 No.Reg 203 mengenai pemilihan, membahas tentang ra pendukung Abd. Hamid Dg. Magassing supaya diaktifkannya sebagai Walikota akassar.

dari hasil rapat tersebutlah Dewan Kota menentukan calon-calon walikota baru. Maka ketua sidang untuk menentukan calon-calon walikota ditunjuklah panitia yaitu Manusama sebagai ketua serta Moh. Nur Haeba Dg. Situju dan Salim Dg. Sitaba sebagai anggotanya. Sebagai hasil rapat tersebut lahirlah beberapa calon-calon walikota dengan jumlah 6 nama di antaranya:

1. Abdul Hamid Dg. Magassing, dari LISS
2. Abdul Radjab Dg. Masikki, dari MASYUMI
3. Haji andi Patoppoi dari PIR
4. H.A. Lumenta, dari PARINDRA
5. Pakki Dg. Masiga, dari PKR
6. Ahmad Dara Sjahruddin, dari MASYUMI⁶⁰

Dalam pencalonan ini setiap calon dipilih satu persatu, dari nama-nama dari hasil rapat diatas diatas maka dipililah satu calon sebagai kandidat 1 yang mendapatkan suara mutlak secara otomatis akan menjadi calon walikota yang berdasarkan pasal 26-27-28-29-30⁶¹ tentang tata tertib⁶². Oleh karena itu dalam pemilihan ini dilakukan dengan mengikuti tata tertib yang ada.

Pada pemungutan suara pertama :

1. Ahmad Dara Sjahruddin mendapat suara mutlak sejumlah 12 suara
2. Pakki Dg. Masiga, 5 suara
3. H.A.Pottopoi, 2 suara
4. H. Andi Lumenta, dari PARINDRA



⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹Lihat Lampiran

⁶² *Ibid.*

5. Abdul Radja Dg. Masikki, tidak dapat suara

6. Abdul Hamid Dg. Magassing, 2 suara⁶³

Dalam pemungutan suara kedua kalinya:

1. Abdul Hamid Dg. Magassig medapat suara mutlak ialah 15 suara

2. Abdul Radjab Dg. Masikki 2 suara

3. H. Andi Patoppoi, tidak dapat suara

4. H. A. Lumenta, tidak dapat suara

5. Pakki Dg. Masiga, 5 suara⁶⁴

Dalam pemungutan suara ketiga kalinya

Tidak ada satupun calon yang mendapat suara mutlak, oleh karena itu diputuskan oleh sidang diundi kembali dan sebagai kesimpulan dari pemungutan suara keempat kalinya ialah :

1. Abdul Radjab Dg. Masikki mendapat suara mutlak, ialah 12 suara

2. H.Andi Patoppoi, 2 suara

3. H.A.Lumenta, tidak dapat suara

4. Pakki Dg. Masiga, 6 suara⁶⁵

Dalam pemungutan suara kelima kalinya, terbukti pula tidak dapat seorang mendapat mutlak, maka sidang memutuskan undian keenam kalinya. Sampai kesembilan kalinya baru ada suara mutlak ialah:

1. H. Andi patoppoi, mendapat 13 suara

2. Pakki Dg. Masiga, 8 suara



⁶³*Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Lihat Lampiran IV calon-calon Walikota Makassar, hlm. 83.

Untuk lebih dijelasnya, maka yang telah ditentukan menjadi Calon-calun walikota ialah

Tabel V: Perolehan Suara Calon Walikota

No	Nama Calon	Partai	Suara
1	Ahmad Dara Sjahrudin	MASYUMI	12
2	Rajab Dg. Masikki	MASYUMI, PARINDRA, LISS	12
3	Abdul Hamid Dg. Magassing	PIR	15
4	H. Andi Patoppoi	Partai Buruh	13

Berdasarkan Undang-undang Nomor 44/NIT/ Tahun 1950, Dewan Kota inilah yang kemudian mengajukan calon walikota Makassar kepada Menteri Dalam Negeri Mendagri melalui gubernur Sulawesi pada saat itu Sudiro. keempat calon ini lalu namanya diajukan oleh Dewan Kota , yakni :

1. Ahmad Dara Sjahrudin. Dari MASYUMI
2. Rajab Dg Masikki. Dari MASYUMI yang di calonkan oleh PARINDRA dan LISS
3. Abdul Hamid Dg Magassing dari PIR,
4. Andi Patoppoi dari Partai Buruh⁶⁶

Jika dilihat dari perolehan suara maka Abdul Hamid Dg. Magassing lah yang menjadi walikota Makassar pada saat itu karena tingginya suara yang diperoleh dibandingkan 3 kandidat lainnya. Namun trauma akan NIT , pada masa itu kerusuhan terjadi di mana-mana. Ketakutan akan orang-orang yang dulunya bekerja dengan orang-orang Belanda, atau setidaknya mereka adalah bekas-bekas



⁶⁶ Lihat Lampiran IV calon-calun Walikota Makassar, hlm. 83.

pejabat NIT yang diragukan kesetiannya dan loyalitas kepada bangsa dan Negara⁶⁷.

Sehingga membuat Abdul Hamid Dg. Magassing tidak terpilih, begitupula dengan Abd. Radjab Dg. Masikki adalah bekas pejabat-pejabat NIT yakni sebagai Menteri Ekonomi, sedangkan H. Andi Patoppoi pada saat pemerintahan Najamuddin Dg. Malewa yang ikut di scors hal ini yang menjadi cacat atas karirnya dalam dunia politik, sehingga calon walikota hanya Ahmad Dara Sjahrudinlah yang tidak mempunyai cacat akan kepercayaan walaupun isterinya adalah seorang keturunan Indonesia-Belanda dan Ahmad Dara Sjahrudin pun sebagai orang luar beliau tetap di berikan kepercayaan oleh Pemerintah Pusat⁶⁸, di samping itu keuntungan terbesarnya ialah pemilihan Dewan Kota lebih dulu ketimbang pemilihan Walikota yang mana beliau terpilih sebagai anggota Dewan Kota dan mengetuai Dewan Pemerintah Daerah karena menurut UU 1945 Aparatur Pemerintah Daerah Pasal 10. Pemrintah Daerah terdiri atas Dewan Kota dan DPD. Ketua Dewan Kota mempunyai ketuanya sendiri, begitupun DPD. Ketua Dewan Kota di Pilih oleh dan dari anggota DPRD. Sedang ketua DPD adalah Kepala Daerah.

Hal ini yang menjadi pertimbangan Depertemen Dalam Negari. Oleh karena itu Menteri Dalam Negeri saat itu Muh. Roem, Lewat SK. Mendagri

⁶⁷Burhaman Djunedding, "Pesta Demokrasi di Daerah Bergolak: Politik Tingkat Lokal dan Pemilihan Umum di Sulawesi Selatan", dalam Dias Pradadimara dkk (Penyunting). *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950*. (Jogjakarta: PT anisius 2014). Hlm .50.

⁶⁸ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Arsip merintah Sulawesi 1950-1960 No.Reg 203 mengenai biodata dan catatan riwayat lggkat dari calon-calon Walikota Makassar tahun 1952.



nomor : U.P-15/2/3 tanggal. 15 Juni 1952 menetapkan Ahmad Dara Sjahrudin Sebagai Walikota definitif pertama setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia⁶⁹. Pada tanggal 30 Juni 1952 di Balai Pemerintahan Kota Makassar jam 10.00 pagi Ahmad Dara Sjahrudin membacakan sumpah jabatan sebagai pegawai negeri⁷⁰ dengan bunyi sebagai berikut:

Bunyi Sumpah Jabatan Pegawai Negeri

Demi Allah, saya bersumpah

Bahwa saya, untuk mendapat jabatan atau pekerjaan saya ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa ataupun kedok apapun juga, tidak member atau menyanggupi akan member sesuatu, kepada siapapun juga.

Bahwa saya, akan setia dan taat, kepada Negara Republik Indonesia

Bahwa saya, akan mengang rahasia sesuatu yang menurut saya, sifatnya, atau menurut perintah harus dirahasiakan.

Bahwa saya, tidak akan menerima hadiah, atau sesuatu pemberian, berupa apa saja, dari siapapun juga, yang saya tahu ataupun patut, dapat mengira, bahwa ia mempunyai, hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa, akan lebih mementingkan, kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri. Seseorang atau golongan.

Bahwa saya, senantiasa akan menjunjung tinggi, kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri⁷¹.

Gubernur Sudiro atas nama Menteri Dalam Negeri sesuai dengan protokol pelantikan kepada kepala daerah tanggal 4 Januari 1947 Nomor. A. 10/1/2, telah melantik Saudara Ahmad Dara Sjahrudin sebagai Walikota Makassar⁷²



⁶⁹Dias Pradadimara, *op cit.* hlm 50

⁷⁰ Lihat Lampiran VIII Pelantikan Walikota Makassar Ahmad Dara Sjahrudin, m. 86.

⁷¹*Ibid.*

Mulailah pada saat itu Makassar di bawah pemerintahan walikota baru, Walikota baru menjalankan pemerintahan menurut cara-cara yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 44 tahun 1950. Di mana pemerintah daerah itu terdiri dari Dewan Pemerintahan Daerah dan Dewan Kota sebagai hasil keputusan bersama.



⁷² Kemetrian Penerangan. *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi*. (Djakarta : meterian Penerangan .1953). Hlm, 197.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN TANTANGAN AHMAD DARA SJAHRUDDIN PADA MASA PEMERINTAH 1952-1957

4.1. Kebijakan dan Masalah yang dihadapi Ahmad Dara Sjahrudin

A. Masalah Keuangan

Pada tanggal 30 Juni 1952 setelah pelantikannya sebagai Walikota Makassar definitif pertama setelah NKRI, Ahmad Dara Sjahrudin perantau asal Minangkabau ini menghadapi berbagai masalah-masalah pelik di Kota Makassar. Masalah-masalah yang dihadapi Ahmad Dara Sjahrudin salah satunya adalah masalah keuangan. Karena pada saat itu Kota Makassar baru saja mengalami transisi pemerintahan dari masa NIT ke masa NKRI⁴⁹.

Kondisi keuangan yang dialami Kota Makassar sangat sulit, karena baru mengalami over dari pemerintahan NIT. Anggaran saat itu sangat terbatas karena pemerintah pusat hanya memberi bantuan untuk anggaran kegiatan yang sifatnya rutin saja, sehingga anggaran pembangunan-pembangunan kota dilakukan dan diusahakan serta dipikirkan sendiri oleh pemerintah setempat seperti Walikota, Dewan Kota, Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Pada saat itulah Dewan Kota memilih dan membentuk DPD di mana tugasnya akan membantu meningkatkan keuangan daerah.

Beberapa usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan keuangan daerah. Seperti, dengan melakukan pungutan/retribusi pada beberapa



⁴⁹Chaniago, J. R. *Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia: Peranan pemimpin Lokal Dalam Dinamika Politik Lokal Di Sulawesi Selatan Dan Sumatera mur*. (Disertasi yang belum diterbitkan: Universitas Gajah Mada, 2002). Hlm. 551-552.

bidang, antara lain : pasar, Rumah Potong Hewan (RPH), dan beberapa retribusi lainnya seperti penyewaan tanah, retribusi air, dan retribusi pembengkalan. Namun semua itu belum bisa mencukupi dalam mengatasi peliknya masalah kota⁵⁰.

Retribusi juga diterapkan pada kendaraan seperti sepeda, becak karena saat itu belum ada yang namanya bis, angkutan kota. Model transportasi yang memenuhi kota adalah sepeda dan becak. Karena itulah dengan banyaknya keberadaan sepeda dimanfaatkan oleh pemerintah kota sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan keuangan daerah. Berdasarkan peraturan daerah sepeda dikenakan penning (pajak kepemilikan) sebesar Rp. 4,- (empat rupiah) pertahun⁵¹.

Saat Ahmad Dara Sjahrudin memimpin sebagai Walikota Makassar, luas wilayah Kota Makassar tidaklah seluas saat ini. Luasnya Kota Makassar sekitar 25 Km²

A. Masalah Perumahan

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Ahmad Dara Sjahrudin sebagai walikota adalah penataan perumahan rakyat. Dampak yang ditimbulkan dari perang pada waktu itu, menyebabkan rumah-rumah milik perseorangan diambil alih oleh pemerintah setempat. Kebanyakan perumahan-perumahan saat itu dikuasai pemerintah, yang berada di sekitar Jalan Merdekaya. Namun sekarang lebih dikenal dengan Jalan Gunung Latimojong⁵².



⁵⁰Nuraeni Ma'mur, *Walikota Makassar Legenda Di Timur, Persembahan 400 tahun Kota Makassar*, Yapensi Jakarta & Pemerintah kota Makassar : 2007, hlm. 37-38.

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*

Karena banyaknya rumah yang dikuasai oleh pemerintah pada saat itu jelas merugikan masyarakat. Terbatasnya jumlah perumahan sehingga satu rumah harus diisi oleh dua atau tiga kepala keluarga. Pemerintahlah yang menentukan satu rumah diisi oleh beberapa kepala keluarga tergantung besar-kecil ukuran rumah tersebut. Saat itu tidak ada orang yang seenaknya bisa menempati sebuah rumah untuk keluarganya saja.

Segala usaha yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan perumahan-perumahan baru bagi rakyat. Pemerintah Kota Makassar mulai melakukan pinjaman uang kepada kepala jawatan pekerjaan rumah di Jakarta. Untuk membangun 40 buah rumah rakyat yang sederhana⁵³.

Dalam pembangunan 40 rumah rakyat tersebut, ada beberapa masalah yang timbul dalam kontrak perjanjian⁵⁴ yang dilakukan pada tanggal 29 April 1953 telah ditandatangani oleh Walikota Makassar dengan Jawatan Perumahan Rakyat Pusat yang berada di Jakarta. Pokok permasalahannya adalah kontrak perjanjian tersebut dilakukan oleh Walikota Makassar Ahmad Dara Sjahruddin seorang diri di Jakarta. Tanpa sepengetahuan dari anggota Dewan Kota Makassar, sehingga terjadi ketidaksepahaman antara walikota dan anggota Dewan Kota. Menurutnya isi perjanjian tersebut dianggap terlalu memberatkan kotapraja. Oleh sebab itu pada tanggal 24 Juni 1953 anggota Dewan Kota mengadakan rapat

⁵³Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) tahun 1946-1960. No.reg. 234. mengenai Warta Politik di akassar tahun 1952-1956 membahas tentang politik, keadaan kota dan permasalahan kota akassar tahun 1953.

⁵⁴Isi perjanjian kontrak antara walikota Makassar Ahmad Dara Sjahruddin dengan kepala jawatan perumahan rakyat Ir. K. Hadinoto mengenai peminjaman uang terhadap pembangunan 40 buah perumahan rakyat terdapat pada lampiran I. Hal.73.



mengenai pembangunan 40 buah perumahan rakyat. Rapat tersebut diusulkan oleh La side, J.Kiapoli, M. Zajad, Salim Dg. Sitaba, Ch. Salawati dengan hasil putusan sebagai berikut:

1. *Peninjauan kembali tentang kontrak pemberian pinjaman uang dengan menuntut.*
 - a. *Penghapusan penyetoran lebih dahulu 20% dari harga rumah*
 - b. *Supaya pembayaran sewah tiap-tiap bulan ditetapkan Rp. 30,-*
2. *Diberi tempo kepada DPD selama seminggu terhitung mulai 24 Juni 1953 untuk meminta keputusan dari jawatan perumahan pusat mengenai permintaan Dewan Kota KBM dan apabila dalam tempo tidak dapat diputuskan yang memuaskan maka rumah-rumah tersebut akan dikembalikan kepada Negara⁵⁵.*

Pada tanggal 25 Juni 1953 Walikota Makassar Ahmad Dara Sjahrudin mengirimkan surat kepada anggota Dewan Kota. Surat tersebut mengatakan bahwa, permintaan anggota Dewan Kota atas ditiadakannya 20% uang muka terhadap peminjaman uang pembuatan perumahan tersebut tidak disetujui oleh jawatan perumahan rakyat pusat di Jakarta, tetapi boleh diturun sebanyak 10% dan sisa pembayaran dimuka harus dibayar dengan angsuran dalam waktu 3 tahun. Sedangkan jangka waktu angsuran itu tetap 25 tahun, karena dari pemerintah pusat dipinjam untuk waktu 25 tahun. Ahmad Dara Shjaruddin juga mengatakan dalam suratnya tidak dapat memenuhi permintaan anggota Dewan Kota untuk membatalkan perjanjian ini dan menyerahkan kembali 40 buah rumah yang hampir selesai ke jawatan perumahan rakyat Karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dengan jawatan perumahan rakyat dan



⁵⁵Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Arsip opinsi Sulawesi (Rahasia) tahun 1946-1960. No.reg. 234. mengenai Warta Politik di akassar tahun 1952-1956 membahas tentang politik, keadaan kota dan permasalahan kota akassar tahun 1953

mengingat derita penduduk kota atas terbatasnya perumahan rakyat, karena masalah perumahan ini yang sudah menjadi rentetan perjuangan pemerintah Kota Makassar sejak tahun 1951⁵⁶.

Ahmad Dara Sjahrudin juga membangun beberapa kawasan perumahan untuk rakyat, Kawasan perumahan ini sisa-sisanya masih dilihat seperti yang ada, di Jl. Kande, dan dibelakang Universitas Kristen Indonesia UKI di Jl. Cendrawasih⁵⁷.

Masalah perumahan ini juga terkait dengan adanya pembauran penduduk kota. Sebelumnya Belanda menciptakan pembagian penduduk dalam kotak-kotak. Sehingga terlihat pembeda pada masyarakat Kota Makassar seperti adanya kaum Bumi Putera, Timur Asia dan lain-lain. Belum lagi ada berbagai suku-suku yang mendiami Kota Makassar.

Hal ini membuat Ahmad Dara Sjahrudin menganggap semua ini akan menjadi sebuah ancaman di masa depan. Sebab itu Ahmad Dara Sjahrudin mengambil keputusan melarang pembangunan rumah-rumah atau perkampungan yang berdasarkan pada kelompok-kelompok suku atau golongan tertentu. Bahkan untuk merealisasikan hal tersebut, kampung pecinaan pun berusaha untuk dihilangkan dalam arti di baurkan, akan tetapi karena pecinaan sudah ada sejak sebelum Ahmad Dara Sjahrudin menjadi Walikota Makassar sulit untuk menghilangkan kelompok-kelompok suku yang sudah lama ada itu.



⁵⁶Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Arsip opinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960. No.reg. 234.mengenai Warta Politik di Makassar nun 1952-1956. Membahas tentang politik, permasalahan pada Kota Makassar pada nun 1953.

⁵⁷ *Ibid.*

B. Masalah Pendidikan

Pada masa pemerintahan NIT pengambilan kembali lembaga pendidikan yang pernah diasuh oleh Belanda dan Jepang. Nama dari sekolah tersebut diubah dari *Volkschool* menjadi Sekolah Rakyat (SR) *Vervolgschool* menjadi sekolah sambungan sedangkan MULO menjadi Sekolah Menengah Umum (SMU)

Masalah pendidikan pada waktu itu sangatlah menyedihkan jumlah sekolah sangat tidak memadai. Saat itu hanya dua Sekolah Dasar yang ada di Kota Makassar, yakni Sekolah Rakyat yang dikuasai pemerintah pusat. Sekolah Rakyat yang dibiayai sendiri pemerintah kota menjadi perhatian utama Ahmad Dara Sjahrudin.

Untuk mengatasi masalah pendidikan yang terjadi di Kota Makassar. Walikota Makassar Ahmad Dara Sjahrudin menambah gedung-gedung sekolah dan menambah ruangan-ruangan sekolah. Serta mengembangkan pendidikan dengan mengakali keterbatasan tempat, dengan banyak sekolah yang didirikan dalam satu pekarangan yang dijadikan dua atau tiga sekolah contohnya seperti Sekolah Dasar Mangkura.

Universitas belum pernah didirikan di masa kolonial sebelum kedatangan Jepang, di Sulawesi Selatan dan di Indonesia bagian timur Pada tahun 1947 di masa NIT, segala cara usaha dilakukan untuk mendirikan sebuah universitas, namun baru terlaksana pada tahun 1948 di mana Universitas Indonesia di Jakarta mendirikan cabang Fakultas Ilmu Ekonomi di Makassar⁵⁸.



⁵⁸Dias, Pradadimara, "Kronika Sulawesi Selatan di Tahun 1950an", dalam Dias, Pradadimara, dkk, (Penyunting). *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950*, Jakarta: PT Kanisius 2014). Hlm .17.

Salah satu usaha yang dilakukan untuk memperkuat fakultas dengan di datangkannya dosen ke Kota Makassar. Hal ini mendapat respon yang baik dari masyarakat. Adanya respon positif dari masyarakat pada awal didirikannya fakultas ini sudah diterima 36 mahasiswa dan jumlahnya kian meningkat. Sejak berdirinya fakultas atau lembaga pendidikan ini menjadi fakultas pertama yang ada di Indonesia bagian timur.

Namun, karena banyaknya peristiwa terjadinya serta berbagai kekacauan di dalam Kota Makassar. Disebabkan oleh Andi Aziz, dan masalah gerilya di luar kota merugikan beberapa kalangan seperti para pelajar, mengakibatkan dibekukannya Fakultas secara paksa di tahun 1950⁵⁹. Berbagai usaha dilakukan pada saat itu untuk menghidupkan kembali fakultas-fakultas yang dibekukan tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga banyak didirikan fakultas-fakultas swasta untuk menggantikan fakultas yang di bekukan seperti Fakultas Hukum, Fakultas Sosial Ekonomi dan Fakultas Sastra.

Mendirikan sebuah universitas di Kota Makassar menjadi keinginan terbesar oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Di mana pada tahun 1952 ada usaha untuk mendirikan universitas lain yang dirintis oleh beberapa pegawai Kantor Menteri Penerangan Agama di kota Makassar yang berasal di Sumatera Barat. yang saat itu mulai mendirikan Universitas Muslim Indonesia UMI dengan mencari dukungan dari tokoh masyarakat Sulawesi selatan. Hingga tahun 1953 yayasan wakaf UMI berhasil dibentuk dan salah satu anggotanya adalah Ahmad



⁵⁹ Lihat Anna Asriani Muchlis, Kampus Hijau di Tengah Perubahan Zaman : Universitas Muslim Indonesia 1954-1965, (Skripsi yang belum diterbitkan :Universitas asanuddin , 2013). Hlm 49-53.

Dara Sjahrudin sekaligus walikota⁶⁰. Kemudian pada tahun yang sama UMI memulai kuliah pertamanya yang diselenggarakan di emperan-emperan kantor, karena UMI berkembang secara perlahan-lahan dan hal inipun semakin dipersulit ketika tokoh-tokoh UMI dikaitkan dengan pemberontakan yang dilakukan PRRI.

Berdirinya UMI serta adanya mahasiswa dari Fakultas-fakultas yang berasal dari cabang UI yang selama ini aktif kian meningkat jumlahnya hingga 107 pada tahun 1954 sehingga para mahasiswa mendesak agar didirikan sebuah universitas. Pada tahun 1955 Fakultas Kedokteran cabang UI sudah dibuka dengan Ahmad Dara Sjahrudin sebagai panitia persiapan pembangunan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan anggaran Rp. 10.29.2.13,- melalui anggaran RI. Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan⁶¹. Oleh karena itu para mahasiswa terus mendesak agar di Kota Makassar segera dibentuk Universitas sendiri yang berasal dari fakultas-fakultas cabang yang selama ini baru diaktifkan kembali. Pada tahun 1956 usaha untuk mendirikan sebuah Universitas Negeri akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 1 Juni Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan memutuskan akan didirikannya Universitas Hasanuddin di Makassar. Hal ini diperkuat dengan keputusan Peraturan Pemerintah no 23 tahun 1956 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden RI tanggal 8 September meski berlaku pada tanggal 1 September 1956 sejak bukannya.

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Peopinsi Sulawesi Selatan. Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang 1926-1988 Vol.1 No.reg.78. mengenai Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin membahas tentang pertanggung jawaban mengenai pembangunan Fakultas Kedokteran



Universitas Hasanuddin berdiri dengan 4 Fakultas yakni Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Kemasyarakatan serta Fakultas Kedokteran⁶². Ikut andilnya beberapa orang seperti Prof. Drs. G.J. Wolhoff, Mr. Tija Kok Tijang, J.E Tatengkang, Syamsuddin Dg. Magawing dan Ahmad Dara Sjahrudin serta gubernur Sudiro, yang saat itu ikut dalam usaha didirikannya Universitas Hasanuddin adalah salah satu usaha dalam meningkatkan dunia pendidikan di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar.

C. Masalah Uang Lembur

Soal uang lembur ini adalah soal upah, soal gaji dan dalam hal ini membicarakan soal gaji dibagi jadi tiga bagian:

1. Pertama, ialah upah atau gaji yang sudah ditetapkan.
2. Kedua, uang kehormatan atau uang representasi yang sudah ditetapkan.
3. Ketiga, uang lembur yang sama sekali tidak ada ketetapannya.

Uang gaji yang ditetapkan pada saat rapat yang dengan jelas diterangkan bahwa kalau terjadi sesuatu kesalahan dalam melaksanakan pemberian uang lembur, maka harus dikembalikan uang kelebihan tersebut.

Di mana saat itu Anggota DPD bagian keuangan yakni A. Latuperissa membayar uang lembur yang semestinya tidak dijalankan karena saat tanggal 24 Mei 1952 atas nama walikota. Saat itu belum ada walikota, sehingga pemerintahan Makassar dipegang oleh Gubernur Sulawesi.



⁶²Dias, Pradadimara., *op cit.* Hlm .17.

Salah satu surat untuk seluruh pegawai-pegawai Kota Makassar mengenai pembayaran uang lembur bulan Mei 1952. Berbunyi:

Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan uang lembur uang mungkin mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1952 sebagai akibat dari peraturan kenaikan gaji yang juga berlaku mulai tanggal 1 Mei 1952 dan yang mana kekurangan pembayaran gaji bulan Mei 1952 sedapat mungkin akan diusahakan pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 10 juni. Jadi uang lembur selama bulan Mei 1952 terpaksa ditunda pembayarannya, hingga peraturan baru mengenai perubahan pembayaran uang lembur itu telah diterima, karena sampai sekarang belum diketahui bagaimana perubahan peraturan tersebut⁶³.

Permasalahannya peraturan mengenai uang lembur ini sejak dikeluarkan mulai 24 Mei 1952 belum menerima peraturan mengenai uang lembur pada saat itu dikeluarkan oleh Pakki Dg. Masiga sebagai kepala kantor urusan pegawai Gubernur, Pakki Dg. Masiga yang juga bertugas sebagai sekretaris walikota Makassar karena saat itu walikota Makassar masih kosong. Timbang terima antara Pakki Dg. Masiga dan Sikado Dg. Nai yang berlaku 5 Juli 1952, di mana Sikado Dg. Nai itu ditugaskan merencanakan anggaran belanja dan merangkap sebagai bendahara yang membuat daftar gaji, namun sampai April 1953 surat edaran tersebut tidak diterima oleh anggota DPD. Karena ketidaktahuan atas peraturan tersebut, maka pemberian uang lembur kepada pegawai atau buruh yang dilakukan DPD selama 11 bulan dari Mei 1952 sampai April 1953 bagian keuangan A. Latuperissa sehingga Kota Makassar merugi dengan jumlah Rp. 64.477, 37,-. Sehingga walikota yang juga merangkap sebagai ketua Dewan



⁶³Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Arsip opinsi Sulawesi (Rahasia) tahun 1946-1960. No.reg. 234. mengenai Warta Politik di akassar tahun 1952-1956 membahas tentang politik, keadaan kota dan permasalahan kota akassar tahun 1953

Pemerintah Daerah mendapat mosi⁶⁴ tidak percaya oleh beberapa Dewan Kota di mana kesalahan dalam pembayaran uang lembur yang dilakukan DPD bahagian keuangan Kota Makassar.

Oleh karena itu pada tanggal 1 Juli 1953 sidang yang dihadiri oleh 22 Dewan Kota Makassar termasuk Dewan Pemerintah Daerah (DPD) untuk mempertanggung jawabkan masalah ini antara lain:

- Ketua : Ny.Towoliu
Sekertaris : Sikado Dg.Nai
1. M.Towoliu
 2. CH. Salawati
 3. ST. Ebong
 4. M. Zajad
 5. J. Sumbung
 6. M. L. Manusama
 7. Salim Dg. Sitaba
 8. Supangat
 9. M. Noor
 10. Abbas Dg. Mallawa
 11. Hamja Dg. Sau
 12. F. Caunang
 13. Raffiudin
 14. Jan Kiapoli
 15. A.R. Munier
 16. Sjamsuddin Qadaar
 17. J. Mewengkang
 18. A. Latupeirissa
 19. Sjamsuddin Dg. Mangawing
 20. S. H. Ngantung
 21. Suparman

⁶⁴Mosi, adalah keputusan rapat, keputusan bersama dengan satu pemikiran karena adanya hak-hak yang tidak sesuai dengan suatu hal. Mosi sering digunakan oleh anggota parlemen R.I. Mosi ialah hilangnya kepercayaan terhadap seseorang atau lembaga. Jika berhubungan dengan politik, dan jika dikaitkan dengan DPR maka mosi ialah hak-hak DPR. Mosi tidak percaya hak dari DPR untuk menyatakan pendapatnya as ketidakpercayaan kepada pemerintah, walaupun tidak ada peraturan secara tegas menyebutkan tentang mosi tidak percaya, namun ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai hak menyatakan pendapat atas ketidakpercayaan. Jika dilihat dari mosi masuk dalam UU\ no 27 pasal 77 tahun 2009.



22. Ahmad Dara Sjahrudin⁶⁵

Dalam rapat itu anggota DPD mengakui kesalahan atas kelebihan uang lembur yang diberikan kepada buruh atau pegawai 286 dengan jumlah uang Rp. 64. 477, 37,-. Hal ini dibenarkan adanya resolusi Pemimpin Pusat Persatuan Pegawai Propinsi Sulawesi (P.P.P.P.S.) cabang Kota Makassar pada pasal 5 mengatakan:

Bahwa kelebihan pembayaran tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu kesalahan akibat kekeliruan, tetapi dijelaskan adalah tindakan yang disadari oleh pemerintah Kota Makassar, seperti yang dapat dibuktikan dalam isi surat Walikota Makassar tanggal 24 Mei 1952 NO 2741/K.P.

Maka dalam rapat tersebut pada tanggal sabtu, 1 Juli 1953 dilakukanlah poting dalam memutuskan masalah di mana DPD secara keseluruhan atau hanya DPD bagian keuangan bertanggung jawab atas masalah uang lembur dari hasil tersebut sebanyak 17 suara.

Setuju pemerintahan seluruhnya : 11 Suara

Setuju pemerintah Bhg. Keuangan : 6 Suara

Jumlah : 17 Suara

Dengan demikian 11 suara yang setuju untuk pertanggung jawaban masalah ini kepada seluruh DPD dan 6 suara untuk bahagian keuangan saja dan sisanya dari 22 peserta rapat 5 diantaranya meninggalkan ruang sidang.



⁶⁵Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi. Sulawesi Selatan. Arsip tamadya Ujung Pandang 1926-1988 Vol I. No.Reg 155 mengenai Notulen Rapat Dewan Kota masalah uang lembur.

Jadi pertanggung jawaban atas masalah uang lembur ini diberikan kepada seluruh pemerintah DPD dalam hal ini Ahmad Dara Sjahrudin selaku walikota yang juga mengetuai DPD mendapat mosi tidak percaya dengan bunyi:

“Bahwa ketua anggota-anggota dan Dewan Pemerintahan Daerah Kota Makassar, tidak dapat dipertahankan lagi”

Namun karena ketua DPD disini mempunyai 2 jabatan di mana merangkap sebagai Walikota maka Ahmad Dara Sjahrudin bisa jatuhkan dalam kedudukannya sebagai ketua DPD, tetapi tidak sebagai kepala daerah Makassar dalam hal dimaksud ialah walikota.

Kecuali para anggota dewan yang keberatan atas masalah ini dan mengusulkan kepada pemerintah pusat supaya menghentikan kepala daerah dari jabatannya tersebut menurut pasal 17 ayat 3 Undang-undang NIT No. 44/1950⁶⁶ yang berbunyi:

“Kepala daerah, atau kepala daerah bagian/anak bagian dapat diberhentikan oleh yang berwajib atas usul dewan perwakilan Rakyat”

Sehingga putusan dalam menetapkan apakah walikota tetap pada posisinya sebagai kepala daerah masih dipertanyakan. Oleh karena itu dilakukanlah vote untuk diusulkan pada pemerintah pusat agar Ahmad Dara Sjahrudin di turunkan dari jabatan Walikotanya. Dari hasil vote tersebutlah Ahmad Dara Sjahrudin mendapat suara 12 untuk setuju dilaporkan ke pemerintah pusat melawan 9 suara yang tidak setuju dilaporkan⁶⁷.



⁶⁶Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Arsip pribadi uhammad Saleh Lahade 1937- 1973. No. Reg I mengenai UU. UU NIT yang disah 15 ni 1950 atau lihat lampiran II. Hal 75.

⁶⁷Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Arsip otamadya Ujung Pandang 1926-1988 Vol I. No.Reg 155. mengenai Notulen Rapat ewan Kota masalah uang lembur.

Setuju : 12 Suara

Tidak setuju : 9 Suara

Jumlah : 21 Suara

Setelah dilakukanya vote dan hasilnya 12 yang setuju lawan 9 suara yang tidak setuju, maka Anggota Dewan Kota Makassar mengusulkan kepada pemerintah pusat supaya Walikota Makassar Ahmad Dara Sjahrudin dibebaskan tugas sebagai kepala daerah atau walikota. Sebagaimana diketahui dalam kedudukannya sebagai Walikota Makassar yang sekaligus mengetuai DPD Kota Makassar mendapat mosi tidak percaya pada tanggal 1 Juli 1953 dalam rapat yang dilakukan oleh anggota DPR, karena kesalahan pembayaran uang lembur yang dilakukan oleh DPD lama A. Latuparissa. Tetapi sampai tahun 1956 Ahmad Dara Sjahrudin masih tetap menjadi Walikota Makassar, sampai Ahmad Dara Sjahrudin terpilih sebagai salah satu anggota parlemen. Jatuhnya DPD lama yakni :

1. Ahmad Dara Sjahrudin
2. A. Latuparissa
3. M. Noor
4. Ch. Salawati
5. Sjamsuddin Dg. Magawing

gantikan dengan DPD yang baru yakni :



1. Raffiuddin
2. J.Mewengkang
3. Sjamsuddin Dg. Magawing
4. Salim Dg. Sitaba

Masalah uang lembur ini bukan hanya DPD saja yang mendapat dampaknya melainkan Ny.Towoliu yang pada tanggal 1 July 1953 tersebut memimpin rapat mendapat mosi tidak percaya oleh partai MASYUMI, dikarenakan pada saat itu ketua DPD serta bawahannya sama sekali tidak termasuk acara sidang, sehingga keputusan yang diambil mengenai ketua DPD tersebut adalah suatu keputusan yang dipaksakan atas kebijaksanaan ketua Dewan Kota sendiri. Oleh karena itu semenjak 7 Juli 1953 Ny.Towoliu sebagai ketua Dewan Kota mendapat mosi tidak percaya dengan 11 suara dari 17 peserta sidang sejak hari itu Ny.Towoliu tidak dipercaya memimpin sidang lagi akan tetapi jabatan tetap sebagai ketua Dewan Kota Makassar yang digantikan oleh wakil Dewan Kota Raffiuddin⁶⁸.

4.2. Terpilihnya Ahmad Dara Sjahrudin Sebagai Anggota Parlemen

Pemilihan umum pada tahun 1955 di mana Ahmad Dara Sjahrudin dicalonkan sebagai anggota parlemen dan terpilih. Oleh karena itu, terpilihnya Ahmad Dara Sjahrudin sebagai anggota parlemen mau tak mau harus memilih melepas jabatan walikotanya. Sehingga waktu itu Ahmad Dara Sjahrudin datang ke Jakarta untuk menemui ketua umum partai MASYUMI yakni Muh. Natsir



⁶⁸Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Arsip otamadya Ujung Pandang 1926-1988 Vol I. No.Reg 155. mengenai Notulen Rapat Dewan Kota masalah mosi tidak percaya terhadap beleid Dewan Kota Makassar Ny. Towoliu.

untuk menanyakan apakah Ahmad Dara Sjahrudin masih tetap sebagai Walikota Makassar atau maju sebagai anggota parlemen. Sehingga Ahmad Dara Sjahrudin di Sarankan untuk Maju sebagai anggota Parlemen. Hal ini harus dilakukan oleh Ahmad Dara Sjahrudin sebagai konsekwensi anggota Partai, Partai MASYUMI di mana pada waktu masih diterapkan disiplin partai⁶⁹.

Oleh karena itulah Ahmad Dara Sjahrudin melepaskan jabatannya sebagai Walikota Makassar periode 1952-1957. Namun karena terpilihnya sebagai anggota parlemen Ahmad Dara Sjahrudin sebagai Walikota Makassar hanya terhitung 1952-1956 sebagai masa jabatannya, maka sejak resminya diangkat sebagai anggota parlemen 1956. Beliau mundur dari jabatan Walikotanya pada tanggal 9 Maret 1956. Kekosongan jabatan walikota yang terjadi lantas ditunjuklah Ackting Walikota saat itu adalah M. Yusuf Dg. Mile oleh Gubernur atas usul yang diajukan oleh anggota Dewan Kota. Pada bulan September 1957 barulah diadakan pemilihan Walikota Makassar untuk periode selanjutnya.



⁶⁹A. Lili Evita Wawancara Dengan Ahmad Dara Sjahrudin pada tanggal 13 ni 2014

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan mengenai pemerintahan Ahmad Dara Sjahrudin sebagai Walikota Makassar 1952-1956 sebagai suatu keberhasilan dalam tubuh pemerintahan Kota Makassar. Meski semua tidak berjalan mulus, namun segala kendala dapat diatasi selama kepemimpinan Ahmad Dara Sjahrudin.

Dimulai pada tahun 1952 Ahmad Dara Sjahrudin dipilih sebagai anggota Dewan Kota. Tahun 1952 merupakan masa pertama di mana pemerintahan Ahmad Dara Sjahrudin sebagai Walikota Makassar definitif pertama setelah kembalinya RI kedalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi Kota Makassar pada saat itu tidak stabil akibat transisi pemerintahan yang dialami Kota Makassar. Sehingga beliau selaku Walikota Makassar menghadapi banyak tantangan.

Di masa pemerintahannya, Ahmad Dara Sjahrudin melakukan berbagai kebijakan. Di antaranya, kebijakan dalam menghadapi masalah keuangan yang sulit saat itu, dengan melakukan pemungutan pajak pada kendaraan dan objek pajak lainnya untuk meningkatkan keuangan daerah. Menghadapai masalah perumahan, Ahmad Dara Sjahrudin membangun perumahan dengan melakukan pinjaman uang kepada pemerintah pusat, mendirikan Perguruan Tinggi di Kota Makassar, dan hasil dari usahanya dapat dilihat sampai sekarang yakni UMI dan

Fakultas yang kelak menjadi Universitas Hasanuddin.



Ahmad Dara Sjahrudin turun dari jabatannya tahun 1956 sebagai Walikota Makassar atas kemauannya sendiri. Untuk mengisi kekosongan jabatan Walikota Makassar 1956-1957 yang masih periode Ahmad Dara Sjahrudin saat itu jalankan oleh Ackting Walikota M. Yunus Dg. Mile yang ditunjuk langsung oleh Mendagri.

Ahmad Dara adalah Walikota yang beruntung, hingga saat ini perjuangannya masih bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Perjuangannya dalam hal pendidikan utamanya menjadi hal yang sangat luar biasa dalam pemerintahannya ketika Makassar mulai berbenah diri dan berkembang menjadi kota yang sangat penting di Republik ini.



pDAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER ARSIP

Arsip dan Perpustakaan Kantor Balaikota Makassar. Mengenai Foto Pelantikan Ahmad Dara Sjahrudin.

Arsip dan Perpustakaan Kantor Balaikota Makassar. Mengenai Riwayat singkat Ahmad Dara Sjahrudin.

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Arsip Pribadi Muh.Saleh Lahade No Reg 465 mengenai masalah politik, pemerintah dan keagamaan dalam negeri 1950-1958.

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Arsip Pribadi Muh.Saleh Lahade No Reg. 1 mengenai perundang-undangan membahas tentang UU NIT 44 Tahun 1950.

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Arsip Propinsi Sulawesi 1950-1960 No Reg 234 mengenai laporan politik Sulawesi Selatan Makassar 1952-1956. Membahas tentang laporan politik tahun 1953 tentang masalah perumahan di Kota Makassar.

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Arsip Pemerintah Kotamadya Ujungpandang vol: I No Reg 155 mengenai Notulen-notulen rapat DPRD tahun 1953-1958. Membahas tentang mosi tidak percaya Walikota Makassar, mosi tidak percaya ketua DPRD Ny. Towoliu.



Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Arsip Propinsi Sulawesi No Reg 203. Mengenai Surat Keputusan Sebagai Calon Walikota Ahmad Dara sjahrudin, calon-calon Walikota Makassar, dan

diangkatnya St. Yusuf Samaah sebagai ketua DPR Kota Praja Makassar, dalam arsip ini juga membahas mengenai pemilihan membahas biodata para kandidat Walikota.

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Arsip Propinsi Sulawesi. Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang Reg 462, tentang , Rapat Masyumi di Makassar untuk mendirikan sekolah rakyat khusus wanita.

Badan Arsip dan Perpustakaan Nasional Sulawesi Selatan, Arsip Propinsi Sulawesi No Reg 181 mengenai pencalonan Walikota Makassar Ahmad Dara Sjahrudin untuk melakukan Study Tour ke U.S.A.

B. LITERATUR

Baswedan Anies,. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta : Yayasan pustaka obor Indonesia, 2014.

Bambang, Purwanto. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2008.

Bardosono, *Peristiwa Sulawesi Selatan 1950*, Bandung : Yayasan Putaka Militer, 1954.

Manning, Cris Tadjuddin Noer. *Urbanisasi Pengangguran, Sektor Informal di Kota*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1996.

Pradadimara, Dias. Muslimin A,R Effendy. *Kontunuitas & Perubahan Dalam Sejarah, Sulawesi Selatan*, Yogyakarta : Ombak. 2004.



Pradadimara, Dias. dkk, *Negara dan Masyarakat Sulawesi selatan di Tahun 1950*,
Jogjakarta : PT Kanisius 2014.

Djenen, *Pola Pemukiman Penduduk Pedesaan Daerah Sumatera Barat*, Jakarta :
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1980/1981.

Gilbert, Alan & Josef Gugler, *Urbanisasi dan kemiskinan, di dunia ketiga*,
yogjakarta, PT. Tiara Wacana yogya, 1996.

Gonggong, Anhar, *Abdul Qahar Mudzakkar dari Patriot Hingga Pemberontakan*,
Jakarta : Grasindo, 1992.

Harvey, Barbara Sillars, *Permesta Pemberontakan Setengah Hati*, Jakarta :
Grafiti, 1989.

Harvey, Barbara Sillars, *Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi Ke DI/TII*,
Jakarta : Grafiti, 1989.

Hans, Dieter Evers, *Sosiologi Perkotaan, Urbanisasi dan Sengketa Tanah di
Indonesia dan Malaysia*, Jakarta, LP3ES, 1982.

Iskandar, Kemal. *Pemerintah Nagari Minangkabau & perkembanganya*.
Yogjakarta : Graha Ilmu, 2009.

Kementerian Penerangan. *Republik Indonesia*. Propinsi Sulawesi. Jakarta:
Kementerian Penerangan. 1953.



oyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana yogya, 2013.

Paeni, Muchlis, Anhar Gonggong, M.Nur Baso, Sarita Pawiloy, Sejarah Sosial Sulawesi Selatan Mobilitas Sosial Kota Makassar 1900-1950, Jakarta : Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan , 1984.

Mattulada, *menyesuri jejak kehadiran Makassar dalam sejarah*, Yogyakarta : ombak. 2011.

Muhammad, Arfah. Biografi *Pahlawan Palonga Daeng Ngalle Karaeng Polongbangkeng*. Propinsi Sulawesi Selatan Percetakan Ujung Pandang .1988. (Sebagai Acuan Penulisan)

Santoso, Jo. *Kota Tanpa Warga*, Jakarta : KPG & Centropolis, 2006.

Tjondronegoro, Sediono M. P., *Ilmu Kependudukan*, Jakarta : Erlangga 1981.

C. SKRIPSI

Anna Asriani Muchlis, *Kampus Hijau di Tengah Perubahan Zaman : Universitas Muslim Indonesia 1954-1965*, Makassar : Universitas Hasanuddin , 2013.

Mahdis, *Makassar ke Ujung Pandang 1952-1974 (Dari Praja ke Kota Praja)*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 1996.

Mulyadi, *Parta Masyumi Cabang Sulawesi Selatan dan Perjuangannya* , Makassar : Universitas Hasanuddin, 1995.



Lampiran I

PERJANJIAN TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN UANG

Yang bertanda tangan tangan dibawah ini:

1. Ir. K. Hadioto : Kepala Djawatan perumahan rakyat dalam hal ini bertindak untuk dana atas nama Menteri pekerjaan umum dan tenaga dengan demikian mewakili pemerintah yang selanjutnya di sebut Menteri.
2. A.D.Sjahrudin: Kepala Daerah otonomi Kotapraja Makassar di Makassar ,dalam hal ini mewakili Kotapraja yang selanjutnya disebut Kotapraja.

Telah mengadakan perjanjian seperti berikut:

Pasal 1. Menteri memberikan pinjaman uang dengan tidak memungut bunga sebanyak Rp. 600.000,- kepada kotapraja selaras dengan keputusannya tanggal 13-9-1952 No. PRP/62/52 yaitu jumlah yang dapat digunakan hanya untuk membiayai ongkos mendirikan 40 buah rumah rakyat yang dibuat secara sederhana sesuai dengan rancangan gambar.

Pasal 2. Kotapraja harus membayar kembali jumlah yang tersebut diatas dengan angsuran tiap-tiap tahun sebanyak 1/25 dari jumlah tersebut sehingga jumlah semua pinjaman itu dalam 25 tahun akan harus terbayar lunas. Anggsuran pertama dimulai dalam satu tahun setelah rumah selesai.

Pasal 3. Kotapraja diwajibkan menyelesaikan pekerjaanmendirikan perumahan rakyat dalam waktu enam bulan sesudahnya surat perjanjian ini ditandatangani, waktu mana dapat diperpanjang untuk selama-lamanya enam bulan lagi, menteri berpendapat untuk ada alasan yang syah.

asal 4. 1. Kepada Menteri atau yang dikuasakan oleh beliau, Kotapraja diwajibkan memberikan segala keterangan yang diperlukan tentang segala kemajuan pekerjaan dan bahan yang dipakai. Serta



memberikan kesempatan kepada beliau untuk meninjau pekerjaan itu.

2. Begitupun pada tiap-tiap bulannya Kotapraja diwajibkan keterangan tentang penguasaan jumlah uang pinjaman tersebut disertai keterangan-keterangan tentang lanjutan pekerjaan tersebut.

Pasal 5. 1. Setelah peraturan pembiayaan pendirian perumahan tahun 1951 berlaku dan begitupun setelah kas pembangunan oleh Kotapraja terbentuk, maka uang pinjaman itu dianggap diberikan kepada kas perumahan dengan syarat yang ditentukan dalam peraturan dalam peraturan tersebut dan yang tidak bertentangan dengan suatu perjanjian ini rumah itu dianggap termasuk rumah-rumah yang didirikan dengan mendapat bantuan menurut peraturan pembiayaan mendirikan perumahan 1951.

2. Kotapraja diwajibkan untuk menyelenggarakan semuanya yang mengenai administrasi keuangan menurut peraturan itu.

Pasal 6. 1. Bilamana rumah-rumah tersebut telah selesai sedangkan “peraturan pembiayaan mendirikan perumahan 1951” belum berlaku, maka uang pinjaman sebagaimana maksud pada pasal 1 dianggap sebagai pemberian uang muka yang diperhitungkan dan di pertanggung jawabkan sebagai demikian.

2. Untuk hal itu menteri akan mengeluarkan surat putusan otorisasi guna mendirikan rumah-rumah itu dan dengan otorisasi ini pemberian pinjaman uang termasuk ditiadakan.

3. Rumah-rumah yang sesungguhnya menjadi milik Negeri diserahkan dalam penguasaan Kotapraja yang dapat juga menjualkan rumah-rumah itu atas nama menteri setelahnya diperoleh persetujuan dengan pembayaran anggunan atau



dengan syarat-syarat yang kemudian akan ditetapkan oleh menteri.

4. Kotapraja harus menyimpan uang dari hasil penjualan dari rumah-rumah itu dan penguasaan sebagai mana termasuk pada ayat 3 dan tidak diperbolehkan menggunakan uang ini, kecuali telah mendapat izin dari menteri.

Pasal 7. 1. Bilamana Kotapraja menurut dalam menteri tidak atau tidak cukup memenuhi kewajibannya dalam perjanjian ini, maka menteri berhak membatalkan perjanjian ini serentak dan tidak perantaraan hakim.

2. Setelah perjanjian dibatalkan secara demikian maka Kotapraja diharuskan segera membayar kembali uang pinjaman dengan memperhitungkan jumlah yang dikeluarkan untuk mendirikan rumah-rumah itu menurut rancangan, yang telah disahkan.

Pasal 8. Perongkosan untuk perjanjian ini dan semua biaya-biaya yang berkenan dengan hal itu dipukuli oleh Kotapraja.



Lampiran II

UU NIT NO 44 TAHUN 1950

Menetapkan UU sebagai berikut UU pemerintah Daerah Indonesia Timur¹

BAB I

Tentang pembagian Indonesia Timur dalam daerah-daerah yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya

Pasal 1

1. Negara Indonesia Timur untuk sementara disusun dalam 2 atau 3 tingkatan ialah daerah-daerah dan bahagian atau daerah anak bahagian.
2. Daerah-daerah sebagai termasuk dalam ayat 1 adalah sama sebagaimana di tetapkan dalam “ peraturan pembentukan Negara Indonesia Timur” (staatsblad 1946 no17)
3. Daerah bahagian atau daerah anak bahagian akan tetap didalam perturan president.

BAB II

Tentang bentuk susunan pemerintah daerah

Bagian I

Paraturan Umum

Pasal 2

1. Peraturan daerah, daerah bahagian/ anak bahagian terdiri dari dewan pemerintah.
2. Ketua dan wakil ketua perwakilan rakyat dipilih oleh dan dari anggota DPR
3. Kepala daerah dan kepala daerah bahagian/ anak bahagian yang menjabat ketua dan anggota dewan pemerintah dari daerahnya masing-masing.



¹Badan Arsip dan perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Arsip pribadi uhammad Saleh Lahade 1937- 1973. No Reg. 1 mengenai UU

Bagian II

Pasal 3

1. Bagi daerah dan daerah bahagian/anak bahagian jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan oleh pemerintah Negara Indonesia Timur dengan pertimbangan faktor-faktor seperti: khususnya dalam tugasnya otonomi. Kekuatan keuangan, Jumlah penduduk, dan susunan politik.
2. Anggota DPR dipilih untuk setinggi-tingginya 3 tahun lamanya.
3. Menyimpang dari pada ketentuan tersebut ayat 2 anggota DPR yang pertama menurut peraturan ini meletakkan jabatannya bersama-sama pada waktu yang ditentukan dalam UU pemilihan yang kelak akan ditetapkan.

Pasal 4

Yang dapat menjadi anggota, DPR dan daerah bahagian/anak bahagian, ialah:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Telah umur 21 tahun
- c. Bertempat tinggal didaerah yang bersangkutan sedikitnya 6 bulan terakhir.
- d. Cakap dalam menulis dan membaca dalam huruf latin.
- e. Tidak karena keputusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya.
- f. Tidak dengan putusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi di pecat dari hak memilih atau hak dipilih.
- g. Tidak terganggu ingatannya.

Pasal 5

Anggota DPRD tidak boleh merangkap sebagai :

- a. Presiden atau wakil president.
- b. Perdana menteri atau wakil perdana menteri , menteri atau menteri muda
- c. Ketua dan anggota badan pemeriksa keuangan



epala daerah dari daerah yang bersangkutan dan dari daerah yang lebih atas.

anggota DPD yang setingkat lebih atas.

- f. Pegawai yang bertanggung jawab tentang keuangan kepada daerah yang bersangkutan.
- g. Kepala jawatan dan sekretaris daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

1. Anggota DPD tidak boleh melakukan pekerjaan yang memberikan keuntungan baginya dalam hal yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan.
2. Anggota dengan melanggar tersebut dalam ayat 1 setelah diberi kesempatan untuk membela diri dalam lisan dan tulisan dapat diperhatikan oleh DPR yang bersangkutan dan sebelumnya dapat diperhatikan semetara dewan pemerintah.
3. Terhadap putusan pemberhentian tersebut. Dalam ayat 2 anggota yang bersangkutan dalam waktu 1 bulan sesudah menerima putusan itu dapat minta putusan dewan pemerintah yang setingkat lebih atas dari president bagi anggota DPRD

Pasal 7

1. Anggota DPR menerima uang sidang, uang jalan, dan menginap menurut peraturan yang ditetapkan oleh DPR.
2. Peraturan tersebut harus disahkan lebih dahulu oleh presiden bagi daerah dan bagi lain-lain daerah oleh DPRD dari pada daerah yang setingkat lebih atas.

Untuk ketertiban rapat DPRD membuat peraturan tata tertib.

Pasal 11

1. Rapat baru boleh berunding atau mengambil suatu putusan, ialah jikalau jumlah anggota yang hadir dari separuh jumlah anggota DPRD.
2. Suatu putusan rapat dipandang sah bila mendapat suara yang terbanyak dari anggota yang hadir.

ila dalam pemungutan suara mengenai perkara jumlah yang sama, maka



Pasal 12

Ketua dan anggota DPRD tidak dapat dituntut dimuka pengadilan, karena pembicaraan di jalan rapat DPR atau karena tulusnya yang dikirim kepada Daerah Perwakilan Rakyat.

Bahagian III

Dewan Pemerintah

Pasal 13

1. Dewan pemerintah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas dasar perwakilan berimbang.
2. Ketua dan wakil ketua DPR tidak boleh menjadi anggota dewan pemerintah.
3. Jumlah anggota Dewan Pemerintah untuk daerah/ daerah anak bahagian, ditetapkan oleh pemerintah NIT dengan mengamil pertimbangan faktor seperti: luasnya otonom, kekuatan keuangan, banyaknya, dan susunan politik setempat.

Pasal 14

1. Anggota dewan pemerintah dipilih untuk waktu sama, yang menurut UU ini berlaku untuk anggota dewan pemerintah sebagai termasuk dalam pasal 3 ayat 2 dan ayat 3. Kecuali jika ia berhenti baik atas kemauan sendiri maupun karena keputusannya DPR.
2. Barang siapa yang berhenti menjadi anggota DPR berhenti pula menjadi anggota dewan perwakilan.

Pasal 15

Anggota dewan pemerintah penerima uang kehormatan dan mendapat pengganti kerugian biaya penjalan menurut peraturan pemerintah yang akan ditetapkan.



Pasal 16

Mengenai hal-hal menjalankan sampai berlaku peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah NIT.

Bahagian IV

Kepala Daerah, daerah bagian/ anak bagian

Pasal 17

1. Kepala diangkat oleh president NIT dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak empat calon yang diajukan oleh DPR.
2. Kepala daerah bahagian/ anak bahagian diangkat oleh DPRD yang bersangkutan dari sedikit-dikitnya 2 calon dan sebanyak-banyaknya 4 calon yang diajukan oleh DPRD bahagian/ anak bahagian.
3. Kepala daerah atau kepala daerah bahagian/ anak bahagian dapat diperhatikan oleh yang berwajib atas usul DPR.
4. Untuk mewakili kepala daerah atau kepala daerah bahagian/ anak bahagian, jika ia berhalangan oleh Dewan pemerintah Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah bahagian /anak bahagian ditunjuk oleh seorang diantaranya anggota-anggotanya.
5. Kepala daerah sSwapraja diangkat oleh President dari keturunan keluarga swapraja didaerah itu. Dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan dan dengan mengingat adat istiadat didaerah itu, atas pencalonan dari DPR.
6. Untuk daerah Swapraja dapat diangkat seorang wakil kepala daerah oleh president dengan mengingat syarat-syarat tersebut dalam ayat 5 wakil kepala daerah Swapraja adalah anggota DPD.

BAB III

Tentang kekuasaan dan kewajiban anggota Dewan Pemerintah Daerah



Bagian I

Pasal 18

1. Dewan Perwakilan Rakyat mengatur dan mengurus keperluan rumah tangga daerahnya.
2. Hal-hal yang masuk urusan rumah tangga tersebut dalam ayat 1 ditetapkan oleh UU.

Pasal 19

Kewajiban yang tidak termasuk urusan rumah tangga daerah atau daerah bahagian/anak bahagian daerah dapat diserahkan daerah UU Pemerintah NIT atau peraturan daerah kepada DPR atau kepada Dewan Pemerintah dibawahnya untuk dijalankan.

Pasal 20

1. Jika pemerintha daerah melakukan, mengatur dan mengurus rumah tangganya, sehingga merugikan daerah itu atau merugikan Negara maka pemerintaha dengan peraturan pemerintah menentukan cara bagaimana daerah itu harus diatur dan diurus dengan menyimpang dari pasal 18.
2. Jika pemerintah daerah-daerah yang tidak menjalankan hal-hal yang diserahkan kepadanya seperti yang termaasuk dalam pasal 19. Maka oleh pemerintah dengan peraturan pemerintah atau oleh DPRD yang bersangkutan dengan peraturan daerah di tunjuk badan pemerintah yang harus menjalankan.

Pasal 21

1. DPRD membuat pedoman untuk dewan pemerintah guna mengatur cara menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.
2. Pedoman tersebut ayat 1 harus disahkan terlebih dahulu oleh NIT jika mengenai daerah dan oleh NIT jika mengenai daerah-daerah ihagian/anak bahagian.



Pasal 22

Suatu DPR dapat membela kepentingan daerah dan penduduknya dihadapan pemerintah atasnya.

Pasal 23

1. Dewan Perwakilan Rakyat beberapa daerah dapat bersama mengatur kepentingan meeka bersama.
2. Peraturan tersebut ayat 1 demikian juga tentang perubahan dan pencabutannya harus disahkan terlebih dahulu oleh pemerintah NIT bagi daerah-daerah dan bagi lain-lain daerah oleh DPD yang bersangkutan.
Bila tidak dapat persetujuan perubahan dan pencabutan dari peraturan tersebut ayat 1 maka pemerintah NIT atau DPD tersebut dalam ayat 2 yang memutuskan.

Pasal 24

1. DPR untuk kepentingan daerah atau untuk kepentingan pekerjaan tersebut. Dalam pasal 19 membuat peraturan yang disebut “peraturan daerah” dengan tambah tingkatan dan nama daerah.
2. Dalam peraturan daerah tidak diperkenankan diatur sesuatu yang telah diatur dalam peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Peraturan daerah tingkatan lebih diatas tidak boleh mengatur hal-hal yang masuk urusan rumah tangga daerah tingkatan lebih rendah.
4. Peraturan daerah tidak berlaku lagi jika hal yang diatur didalamnya kemudian diatur dalam UU atau dalam peraturan daerah yang elbih tingkatannya.
5. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan UU atau peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
6. Peraturan daerah sudah berlaku dipandangn mulai berlaku sesudah di tandatangani oleh kepala daerah diumumkan menurut cara yang telah ditentukan



Lampiran III

Pemilihan Walikota Makassar 1952 di dasari oleh Tata Terbib Sebagai Berikut

Pasal 26:

1. Apabila diadakan pemungutan suara mengenai seorang, maka ketua mengangkat empat anggota sebagai pemungutan.
2. Mereka ini menyatakan, apakah jumlah suara yang diberikan adalah sama dengan jumlah anggota yang memberikan suara.

Pasal 27:

1. Pemungutan suara diadakan sebanyak empat kali yang sama dengan banyaknya orang yang akan dipilih, diangkat atau diusulkan.

Pasal 28:

1. Surat suara yang tidak diisi atau tidak diisi cukup atau memuat lebih dari satu nama atau ditanda tangani, dianggap tidak berlaku.
2. Apabila ada keraguan-raguan tentang isi dari suatu surat suara, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memutuskan.

Pasal 29:

Surat suara yang terdapat menurut pasal 25 ayat (4) diatas ini tidak berlaku, apabila Rakyat Perwakilan Daerah memutuskan, bahwa yang demikian itu terjadi oleh banyaknya surat suara yang diberikan dan banyaknya anggota yang memberikan suaranya tidak sama.

Pasal 30¹:

1. Apabila pemungutan suara pertama yang tak seorangpun mendapat suara mutlak maka lalu diadakan suara yang kedua.
2. Apabila dalam pemungutan suara ini juga tidak mendapat suara mutlak itu, maka lalu dilakukan pemungutan suara yang ketiga dengan terbatas, yaitu pemungutan dilakukan kepada dua suara terbanyak
3. Apabila dalam pemungutan suara yang ketiga ini mendapat suara yang sama maka undianlah yang member putusan.



¹Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Arsip Pemerintah Sulawesi 1950-1960 No.Reg 203 mengenai Pemilihan, membahas UU NIT No. 44 1950 tentang tata cara pemilihan.

Lampiran IV

Biodata Ahmad Dara Sjahrudin

Salinan

DAFTAR RIWAJAT HIDUP ANGGOTA D.P.R. KOTA BESAR

M A K A S S A R


1. Nama dan nama ketjil dari anggota : Ahmad Dara Sjahrudin.
2. Tempat lahir : M a t u r (Bukit-Tinggi).
3. Tanggal lahir (umur) : 16 Augustus 1920 (32 tahun).
4. Mulai djadi anggota D.P.R. : 4 M a r e t 1952.
5. Pendidikan :
 1. Tammat A.M.S. bah. B di Surabaya.
 2. Perguruan Tinggi bah. Kedokteran di Djakarta (1941/1942).
 3. Tammat Sekolah Kehakiman di Djakarta, jang idjazahnja disamakan dengan C II pada Perguruan Tinggi bah. Hukum, setela menempuh udjian tambahan. Lulus dalam udjian untuk C I pada Perguruan Tinggi bah. Hukum.
6. Pengalaman :
 1. Redaktur pada Kotapradja Malang.
 2. Hakim Muda, kemudian Hakim pada Pengadilan Negeri di Malang.
 3. Anggota pada Kantor Adpokat di Malang.
 4. Redaktur pada Kotapradja Makassar.
 5. Sekertaris dan Anggota "engganti Komis Penjewahan Makassar.
 6. Sekertaris Kotapradja Makassar.
 7. Pegawai Firma "Hadji Afi merk Toko Adjataparang" Makassar.
 8. Guru S.M.T. Perjuangan di Malang.
 9. Pengadjar pada Balai Pengetahuan Rakja (Volksuniversiteit) di Malang.
 10. Guru Sekolah Menengah Islam di Malang.
 11. Guru S.M.P. dan S.M.A. Nasional Makass
 12. Guru Sekolah Guru Menengah Atas Islam di Makassar.
7. P a r t a i : Partai Politik Islam "M a s j u m i."
8. Keterangan lain2 :
9. A l a m a t : Djalan Chairil Anwar No.26 A. Makassar.

Diisi dengan sebenarnya :
Anggota D.P.R. tersebut,

t.d.t.

(Ahmad Dara Sjahrudin)

Jang mengambil salinan :
Sekertaris,


Maddolangeng



ber Badan Arsip dan Perpustakaan Sulawesi Selatan.

Calon-calon Walikota Makassar

Sampiran 1.

GUBERNUR PROPINSI SULAWESI

Berita ringkas dari Sidang D.P.R.D. Kota Besar Makassar tanggal 29 Maret 1952 tentang menentukan tjalon2 Walikota Makassar.

Sidang dibuka pada djam 9.30 ; jang hadir ada 21 anggota. Atjara sidang D.P.R.D. untuk menentukan tjalon2 Walikota Besar Makassar, Lebih dahulu Ketua menundjuk panitia pemungutan suara jang diketuai oleh Manusama dengan anggota2nja Moh.Nuri HaEba Daeng Situdju dan Salim Daeng Sitaba.

Sebagai hasilnja maka didapat sedjumlah 6 tjalon dan diantaranya :

1. Abdul Hamid Daeng Magassing, dari L.I.S.S.
2. Abdul Radjab Daeng Masikki, dari Masjumi.
3. Hadji Andi Patoppoi, dari P.I.R.
4. H.A.Lumenta, dari Parindra.
5. Pakki Daeng Masiga, dari P.K.R.
6. A.D.Sjahrudin, dari Masjumi.

Pada pemungutan suara pertama :

1. A.D.Sjahrudin mendapat suara mutlak sedjumlah 12 suara.
2. Pakki Daeng Masiga, 5 suara.
3. H.A.Patoppoi, 2 suara.
4. H.A.Lumenta, tidak dapat suara.
5. Abdul Radjab Daeng Masikki, tidak dapat suara.
6. Abdul Hamid Daeng Magassing, 2 suara.

Dalam pemungutan suara ketiga kalinya :

Tidak ada satu orang mendapat suara mutlak, oleh karena itu diputuskan oleh sidang diundi kembali dan sebagai kesimpulan dari pemungutan suaras keempat kalinya ialah :

1. Abdul Radjab Daeng Masikki mendapat suara mutlak, ialah 12 suara.
2. H.Andi Patoppoi, 2 suara.
3. H.A.Lumenta, tidak dapat suara.
4. Pakki Daeng Masiga, 6 suara.

Dalam pemungutan suara kelima kalinya, terbukti pula tidak ada seorang mendapat suara mutlak, maka sidang memutuskan undian keenam kalinya.

Sampai kesembilan kalinya baru ada suara mutlak, ialah :

1. Hadji Andi Patoppoi, mendapat 3 suara.
2. Pakki Daeng Masiga, 8 suara.

Sebagai djelasnja, maka jang telah ditentukan menjadi tjalon2 Walikota ialah :

1. Tjalon pertama, A.D.Sjahrudin dari Masjumi.
2. Tjalon kedua, Abdul Hamid Daeng Magassing dari L.I.S.S.
3. Tjalon ketiga, Abdul Radjab Daeng Masikki dari Masjumi.
4. Tjalon keempat, H.Andi Patoppoi dari P.I.R.

Sidang ditutup pada djam 12.00

Gubernur Sulawesi,


SOEDIRO



an Arsip dan Perpustakaan Sulawesi Selatan. Terpilihnya Ahmad Dara Sjahrudin Sebagai Calon Walikota Makassar

Lampiran VI

Surat Keterangan Ahmad Dara Sjahrudin sebagai walikota Makassar

SURAT KETERANGAN

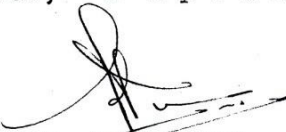
Jang bertanda tangan dibawah ini:

A.D. SJAHRUDDIN

dengan ini menerangkan, bahwa ia menerima pentjalonannja sebagai tjalon Wali Kota, Kota Besar Makassar.

Djika sekiranya ia diangkat sebagai Wali Kota Makassar ia akan menerima pengangkatan itu dan ia bersedia untuk menjalakan tugasnja dengan segera.-

Makassar, 1 April 1952.-


A.D. SJAHRUDDIN.-

Sumber Badan Arsip dan Perpustakaan Sulawesi Selatan.
Surat Keterangan Ahmad Dara Sjahrudin sebagai walikota Makassar
Tahun 1952



Lampiran VII

Undangan Pelantikan

Berke 3/Des Untk. berkes. Telun be keran Wale
Kota Makassar
GUBERNUR SULAWESI
---H---

SEGERA

Makassar, 27 Djuni 1952.

UNDANGAN

No. U.U.2/7/16

Dengan hormat !

Bersama ini kami mengundang Paduka Tuan/
Tuan/ Saudara beserta isteri untuk menghadiri
resepsi berdiri (staande receptie) jang akan di-
langsungkan berkenaan dengan pelantikan Walikota
Makassar: Saudara A.D.Sjahrudin.

Tempat : Balai Pemerintah Kota Makassar

Waktu : Tanggal 30 Djuni 1952 djam 10.00
pagi.

Atas kedatangan Paduka Tuan/Tuan/Saudara
terlebih dahulu kami mengutjap terima kasih.-

A.n. Gubernur Sulawesi
Sekertaris,

(Maddalangeng)



Sumber Badan Arsip dan Perpustakaan Sulawesi Selatan.
Undangan Pelantikan Ahmad Dara Sjahrudin sebagai walikota Makassar
Tahun 1952



Lampiran VIII

Pelantikan Walikota Makassar



Sumber Arsip dan Perpustakaan Walikota Makassar.

Pelantikan Walikota Makassar Ahmad Dara Sjahrudin Oleh Gubernur Sulawesi Bapak Sudiro Yang disaksikan Oleh K.H. Sukri, K.H.Ahmad Bone dan K.H.Muchlis Pada Tanggal 31 Juni 1952.



Lampiran IX

Biografi singkat Ahmad Dara Sjahrudin Tulisan Tangan sendiri.

CURRICULUM VITAE

1. Nama : AHMAD DARA SJAHRUDDIN

2. Tempat / tanggal lahir : MATUR, SUMATERA BARAT

3. Keluarga : 16 AGUSTUS 1920

a. Nama ayah : AHMAD DAHAR

b. Nama ibu : DARAMA KAMSIAH

c. Nama istri : HELGA EMERENTIA

d. Anak :

1. DR. H. HELDARSJAH SJAHRUDDIN
2. DR. CHAIRULSJAH SJAHRUDDIN
3. DR. BAHRUMSJAH SJAHRUDDIN
4. DR. HELDALINA SJAHRUDDIN
5. DR. ROSIANA A. SJAHRUDDIN
6. —
7. —
8. —

4. Pendidikan :

1. TAMAT H.I.S. ZAMAN BELANDA
2. " MULO " "
3. " A.M.S.-B. " "
4. " SEKOLAH HAKIM 2 JAKSA
5. " ZAMAN JEPANG.
6. KULIAH DI FAK. KEDOKTERAN ZAMAN BELANDA
7. KULIAH DI FAK. HUKUM ZAMAN " KEMERDEKAAN "
- * TERHENTI KARENA PERANG JEPANG DAN PERANG KEMERDEKAAN.

5. Alamat sekarang : JL. J. LATUMAHINA N° 4 (49 LAMA) MAKASSAR.

Sumber Arsip dan Perpustakaan Walikota Makassar



Biografi singkat Ahmad Dara Sjahruddin Tulisan Tangan sendiri

6. Riwayat pekerjaan/jabatan	<p>REDAKTUR PADA PEM. KOTA MALANG. HAKIM PEMBANTU DI PENGADILAN NEGERI MALANG. REFERENDARIS PD. PEM. KOTA MAKASSAR. SEKERTARIS PEM. KOTA MAKASSAR. WALI KOTA MAKASSAR.</p>
7. Kegiatan lain	<p>ANGGOTA BADAN PENGAWAS FAK. HUKUM CABANG U. I. (KEMUDIAN FAK. HUKUM UNHAS).</p>
a. Bidang Militer	-
b. Bidang Politik	<p>ANGGOTA DEWAN KOTA MAKASSAR. ANGGOTA D. P. D. KOTA MAKASSAR ANGGOTA D. P. R. - RI ANGGOTA PENGURUS PNI DI MALANG PENGURUS MASJUMI DPW. SULAWESI</p>
c. Bidang Pemerintahan	<p>MENGATASI KESULITAN PERUMAHAN. MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN. MENINGKATKAN PENDIDIKAN A.L. MEMBANGUN SEKOLAH BARU, MENAMBAH RUANGAN & KELAS. MENDARONG BERDIRINYA FAK. HUKUM, FAK EKONOMI. TURUT MENDIRIKAN FAK. KEDOKTERAN, UNIVERSITAS HASSANUDDIN. MELAKSANAKAN P.O.N. DI MAK. DGN A.L. MEMBANGUN STADION. MENINGKATKAN</p>
d. Bidang Sosial-Budaya	<p>* DI BIDANG PENDIDIKAN: KEBERSIHAN, D.I.L. GURU DI SEK. MENENGAH ISLAM, MALANG PENGAJAR DI SMP, SMA NASIONAL MAR. REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA (U.M.I.) DI MAKASSAR.</p>
e. Bidang Organisasi	<p>DIMASA PELAJAR & MAHASISWA BANYAK BERKECIMPUNG DI ORGANISASI PELAJAR & MAHASISWA. TERAKHIR SEBAGAI PENGURUS PEMUDA REPUBLIK INDONESIA (P.R.I.), YG. MERUPAKAN ORGANISASI PERJUANGAN MELAWAN BELANDA DI MALANG & SURABAYA.</p>

Sumber Arsip dan Perpustakaan Walikota Makassar




Biografi singkat Ahmad Dara Sjahruddin Tulisan Tangan sendiri

8. Tanda jasa / penghargaan : WARGA KEHORMATAN KOTA MAKASSAR
PENGHARGAAN ATAS PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM UNTUK D.P.R. DAN
KONSTITUNTE.
- PENGHARGAAN DARI FAK. EKONOMI
,, DARI FAK. KEDOKTERAN UNHAS
,, DARI UNHAS.

9. Kegiatan / penghargaan dari : —
luar negeri

10. Karya – karya tulis : —

Makassar, 31 Maret 2007


AHMAD DARA SJAHRUDDIN.

Sumber Arsip dan Perpustakaan Walikota Makassar



Lampiran X

Ahmad Dara Sjahrudin & Sang Istri



Sumber [www. Lontara Project.com](http://www.Lontara Project.com)

Anna Asriani

Ahmad Dara Sjahrudin Dan Istrinya Helga Emerintia



Ahmad Dara Sjahrudin & Istri

Optimized using
trial version
www.balesio.com



Sumber : Rumah Ahmad Dara Sjahrudin di Jl. Latumahina no 4 Makassar

Keluarga Besar Ahmad Dara Sjahrudin



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Sumber : Rumah Ahmad Dara Sjahrudin di Jl. Latumahina no 4 Makassar

Ahmad Dara Sjahrudin & Keluarga Besar



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Sumber : Andi Lili Evita Tanggal 13 Juni 2014 di Kediaman Ahmad Dara Sjaruddin Jln. Cipinang Jaya Jakarta Timur

Lampiran XI

Makam Ahmad Dara Sjahrudi & Nyoya di TPU Rawangun
Jakarta Timur





Sumber :Anna Asriani foto ini diambil pada tanggal 29 Januari 2015

Tempat Pemakaman Ahmad Dara Sjahruddin & Nyonya di TPU Rawangun
Jakarta Timur





Sumber :Anna Asriani foto ini diambil pada tanggal 29 Januari 2015





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS SAstra**

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAAAN KM.10 MAKASSAR KODE POS 90245
TELEPON 0411-587223 – 580159, FAX 587223, PSW 1177, 1178, 1179, 1180, 1187

Nomor : 2902/UN4.10.1/PP.35/2014
Lamp : Konsep Surat Penugasan
Hal : Permohonan Konsultan Skripsi

Makassar, 6 November 2014

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Sastra
Universitas Hasanuddin
Di
Tempat

Dengan hormat, mahasiswa yang tertera namanya dibawah ini telah memiliki rancangan skripsi yang dianggap layak melalui seminar proposal skripsi pada tanggal 24 Oktober 2014, oleh karena itu mohon diterbitkan Surat Tugas kepada dosen yang tercantum namanya dibawah ini selaku Konsultan/Pembimbing:

No	NIM	Mahasiswa	Konsultan I	Konsultan II
1	F811 10 101	Fitri Febriati Safitri	Dr.Bambang Sulistyo, M.S	Drs.Dias Pradadimara,M.A

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua Jurusan Ilmu Sejarah,

Dr. Bambang Sulistyo Edi P., M.S
NIP 19550315 198503 1 004





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS SASTRA

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10 MAKASSAR KODE POS 90245
TELEPON 0411-587223 – 590159, FAX 587223, PSW 1177, 1178, 1179, 1180, 1187

SURAT PENUGASAN

Nomor: /UN4.10.1/PP.35/2014

Berdasarkan peraturan Akademik Unhas Tahun 2000 Nomor : 6403/204/PP 08/2000,
Mahasiswa : Fitri Febrati Safitri Nomor Pokok : F811 10 101
Program Studi : Ilmu Sejarah Jurusan : Ilmu Sejarah
Telah memenuhi syarat untuk menulis skripsi sebagai tugas akhir penyelesaian studinya. Skripsi mahasiswa tersebut yang berjudul

"Ahmad dara Sjahruddin Sebagai Walikota Makassar 1952-1957"

dan menugasi Dosen berikut sebagai konsultan.

1. Pembimbing I: Dr.Bambang Sulistyو.M.S (NIP.195503151985031004
2. Pembimbing II: Dr.Dias Pradadimara, M.A (NIP. 196412171998031001

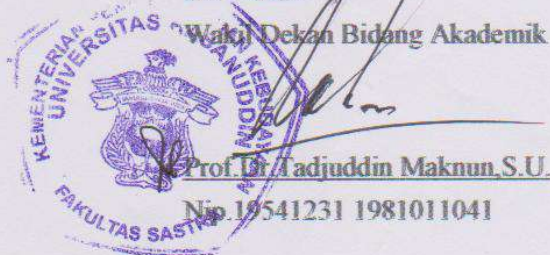
Tugas Konsultan/Pembimbing ini paling lama satu tahun (dua semester) terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat tugas ini.

Harap tugas ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Makassar, 6 November 2014

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U.

Nip.19541231 1981011041





JADWAL KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

JURUSAN ILMU SEJARAH FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS HASANUDDIN

JUDUL SKRIPSI : Pemerintahan Ahmad Dara Sjahruddin sebagai Walikota Periode 1952-1957.

NomorSk : 21902/UN.4.10.1/PP.35/2014

TanggalSk : 6 November 2014

Nama : FITRI FEBRIATI SAFITRI

Pembimbing Skripsi:

Pembimbing 1 : Dr. Bambang Sulistio, M.SI

Pembimbing 2 : Drs. Dias Pradadimara, M.A

Mahasiswa Bimbingan :

Nama : FITRI FEBRIATI SAFITRI

NIM : F811 10 101

No	Hari/Tanggal	Nama Pembimbing	Tanda Tangan	Keterangan
1.	30/Maret/2015	Bambang Sulistio		Tanda tangan skripsi penuntun hilang di sekretariat Wali Kota Makassar jama Ahmad Dara
2.	1 April 2015			cari rujukan sistem pemerintahan sebelumnya 1950-1955
	6 April 2015			Tuliskan catatan kaki juga!

JADWAL KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
JURUSAN ILMU SEJARAH FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS HASANUDDIN

JUDUL SKRIPSI : Ahmad Dara Sjahrudin sebagai Waiikota Periode 1952-1957.

Nomor Sk : 21902/UN.4.10.1/PP.35/2014

Tanggal Sk : 6 November 2014

Nama : FITRI FEBRIATI SAFITRI

Pembimbing Skripsi:



Pembimbing 1 : Dr. Bambang Sulistyono, M.Si

Pembimbing 2 : Drs. Dias Pradadimara, M.A






Mahasiswa Bimbingan :

Nama : FITRI FEBRIATI SAFITRI

NIM : F811 10 101

No	Hari/Tanggal	Nama Pembimbing	Tanda Tangan	Keterangan
1	17/11/2014	Dias P		Baca Tahlil Amal Dan Mubarakah ble 1950an. Sby lantur Bulaleng.
2	22/12/2014	Dias P		Baca Al-Qur'an lantur Malam 1952-1957



2/2- 2015	DIAS P		Cow. 4ty Pasar Baru, sistem ulu Bab III a IV
1/3/2015	DIAS P		Perbaikan Bab I (Munawar wates a II) & Bab III
5 16/3/2015	DIAS P		Bab III <u>menyempul</u> <u>Perbaikan</u> Tabung ulu bab IV
6 20/3/2015	DIAS P		Perbaikan Bab II a I
7 27/3/2015	DIAS P		Sisip <u>menyempul</u> Perbaikan I





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS SASTRA

Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar KODE POS 90245
Telp. 0411-587223-5901159 Fax. 0411-587223

Makassar, 13 Mei 2015

No. : ~~2698~~/UN4.10.1/TU.15/2015
Hal : Undangan Ujian Skripsi
Lamp. : I (satu) berkas

Kepada Yth. Para Dosen Jurusan Ilmu Sejarah

Sehubungan dengan Surat Persetujuan nomor ;009/UN4.41.1.1/PP.32/2015 Fitri Febriati Safitri dengan Nomor Induk Mahasiswa F811 10 101 untuk ujian skripsinya yang berjudul: "**Pemerintahan Ahmad Dara Sjahrudin Sebagai Walikota Makassar 1952-1957**" Dengan ini kami mengajukan panitia ujian skripsi dan sekaligus jadwal ujian skripsi sebagai berikut:

Ketua	: Dr. Bambang Sulistyio Edi P, M.S
Sekretaris	: H.Muh Bahar Akkase Teng,Lcp.,M.Hum
Penguji I	: Dr.Suriadi Mappangara,M.Hum
Penguji II	: Margriet Moka Lappia,S.S.,M.A
Konsultan I	: Dr. Bambang Sulistyio Edi P, M.S
Konsultan II	: Drs.Dias Pradadimara,M.A

Waktu Ujian

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Mei 2015
Pukul : 09.00 Wita-selesai
Tempat : Ruang Jurusan Ilmu Sejarah

Atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U.
Wakil Dekan Bidang Akademik

Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U.
Np.19541231 1981011041





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS SASTRA

Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar KODE POS 90245
Telp. 0411-587223-5901159 Fax. 0411-587223

Makassar, 13 Mei 2015

SURAT TUGAS
No:2698 /UN4.10.1/PP.35/2015

Sehubungan dengan Surat Persetujuan nomor ;009/UN4.41.1.1/PP.32/2015 Fitri Febriati Safitri dengan Nomor Induk Mahasiswa F811 10 101 untuk ujian skripsinya yang berjudul: "**Pemerintahan Ahmad Dara Sjahruddin Sebagai Walikota Makassar 1952-1957**" Dengan ini kami mengajukan panitia ujian skripsi dan sekaligus jadwal ujian skripsi sebagai berikut:

Ketua	: Dr. Bambang Sulistyoyo Edi P, M.S
Sekretaris	: H.Muh Bahar Akkase Teng, Lcp., M.Hum
Penguji I	: Dr.Suriadi Mappangara, M.Hum
Penguji II	: Margriet Moka Lappia, S.S., M.A
Konsultan I	: Dr. Bambang Sulistyoyo Edi P, M.S
Konsultan II	: Drs.Dias Pradadimara, M.A

Waktu Ujian

Hari/Tanggal	: Jumat, 15 Mei 2015
Pukul	: 09.00 Wita-selesai
Tempat	: Ruang Jurusan Ilmu Sejarah

Atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.


a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Prof. Dr. Fadruddin Maknun, S.U.
Nip.19541231 1981011041

